

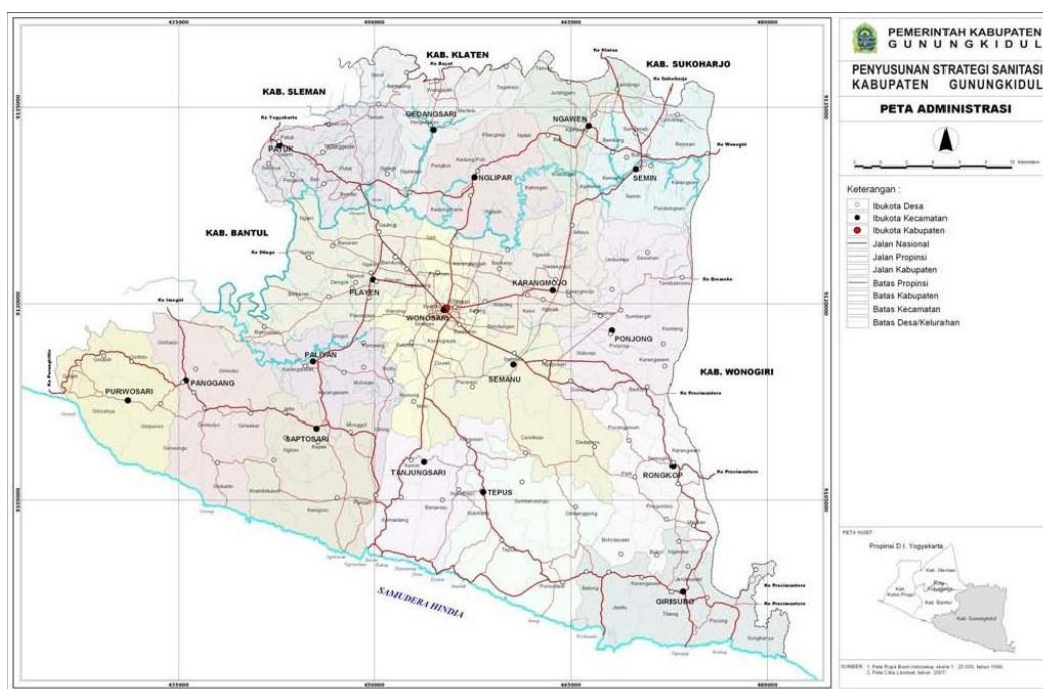
BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memberikan gambaran tentang transformasi konflik pasca penyelesaian konflik di Goa Pindul. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi di objek wisata Goa Pindul, Bumdes Maju Mandiri Desa Bejiharjo, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul maka didapat hasil penelitian sebagai berikut.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Gunungkidul



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Gunungkidul
Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2011.

Kabupaten Gunungkidul terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beribukota di Wonosari. Luas Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi

DIY.⁶⁶ Hal tersebut menjadikan Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah terluas di Provinsi DIY. Terletak antara 7° 46' - 8° 09' Lintang Selatan dan 110° 21' – 110° 50' Bujur Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman DIY, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.⁶⁷ Terletak di wilayah pesisir selatan membuat daerah ini memiliki beberapa wisata pantai yang kerap menjadi tujuan untuk berlibur.

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa/kelurahan, dan 1.431 padukuhan.⁶⁸ Wilayahnya merupakan perbukitan berbatuan gamping atau yang lebih sering dikenal dengan *karst*. *Karst* adalah kawasan karakteristik hidrologi dengan bentuk lahan yang diakibatkan oleh kombinasi dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Kawasan tersebut bercirikan dengan minimnya sungai permukaan tetapi berkembang jalur-jalur sungai bawah tanah.⁶⁹

Wilayah Kabupaten Gunungkidul beriklim tropis dan berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 3 bagian zona pengembangan:⁷⁰

1. Zona utara yang disebut dengan wilayah Batur Agung, memiliki ketinggian 200-700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah ini meliputi Kecamatan Gedangsari, Semin, Nglipar, Ngawen, Patuk, dan Ponjong bagian utara. Kondisinya berbukit-bukit dan sumber air tanah memiliki kedalaman 6 hingga 12 meter dari permukaan tanah. Jenis

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016*, dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id> di unduh pada tanggal 9 Desember 2018, hlm xviii.

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2018*, dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id> di unduh pada tanggal 9 Desember 2018, hlm 6.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 6.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Indikator Kesejahteraan ...*, hlm xviii.

⁷⁰ Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, *Kabupaten Gunungkidul*, dalam www.gunungkidulkab.go.id di akses pada tanggal 27 Desember 2018.

tanahnya didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan.

2. Zona tengah yang disebut dengan wilayah Ledok Wonosari, memiliki ketinggian 150 m- 200 mdpl. Wilayah ini meliputi Kecamatan Wonosari, Playen, Karangmojo, Semanu bagian utara, dan Ponjong bagian tengah. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m - 120 m di bawah permukaan tanah dan terdapat sungai di atas tanah. Jenis tanahnya didominasi asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur sehingga pada musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih dapat bertahan.
3. Zona selatan yang disebut dengan wilayah Gunung Seribu (*duizon gebergton* atau *zuiden gebergton*), memiliki ketinggian 0 m- 300 mdpl. Wilayah ini meliputi Kecamatan Panggang, Saptosari, Purwosari, Paliyan, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Semanu bagian selatan, dan Ponjong bagian selatan. Merupakan kawasan karst, batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*conical limestone*).

Dari ketiga zona pembagian wilayah di atas, zona selatan merupakan zona yang paling luas wilayahnya sehingga topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul didominasi dengan perbukitan *karst*. Zona selatan terdapat beberapa goa alam dan sungai bawah tanah yang mengalir sehingga menyebabkan kondisi lahan kurang subur dan budidaya pertanian di zona tersebut kurang optimal.

Seperti daerah lainnya, Kabupaten Gunungkidul memiliki berbagai macam potensi perekonomian diantara adalah pertanian, peternakan, perikanan, tambang, industri, hutan, flora dan fauna, dan potensi pariwisata. Adapun sebagian besar pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah lahan kering tadah hujan dengan prosentase $\pm 90\%$ yang tergantung pada daur iklim khususnya curah

hujan. Sumber tambang berupa batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, pasir kuarsa, dan kaolin.⁷¹

4.1.2. Gambaran Umum Goa Pindul

Goa Pindul adalah objek wisata alam berupa goa yang menyajikan wisata susur goa bawah tanah dengan aliran air sungai sepanjang goa. Goa Pindul memiliki panjang kurang lebih 350 meter dengan jarak tempuh penyusuran 40-60 menit. Durasi waktu menyesuaikan situasi, kondisi, dan keinginan wisatawan yang bersangkutan. Lebar antar dinding di dalam goa rata-rata 4 meter, ketinggian dari permukaan air dengan atap goa sekitar 5 meter, dan kedalaman sungai sekitar 1-12 meter. Nama Pindul sendiri di ambil dari kata Pipi yang *Kebendul* dalam legenda di kawasan tersebut, sehingga disingkat menjadi Pindul.

Objek wisata Goa Pindul dikenal di kalangan wisatawan karena untuk menyusuri goa dengan melewati sepanjang aliran air sungai bawah tanah menggunakan ban pelampung, oleh karena itu wisata Goa Pindul menjadi kategori minat khusus di Yogyakarta. Aktifitas penyusuran semakin unik karena ban pelampung yang digunakan adalah ban dalam besar (*tube*) sehingga wisata ini juga di kenal dengan nama *Cave Tubing Goa Pindul*. Ban besar (*tubing*) tersebut sudah dimodifikasi atau di beri pengait berupa tali menyilang di tengah yang berfungsi sebagai tempat duduk di atas air. Selain itu, wisatawan juga harus menggunakan jaket pelampung yang di pakai seperti rompi dan sudah disediakan di tiap-tiap sekretariat. Jaket pelampung yang disediakan sudah memenuhi standar tim SAR (*Search and Rescue*) dengan ukuran tertentu yang mampu menahan berat badan lebih dari 100 kg agar tetap mengambang di permukaan air. Untuk pelampung disediakan dalam 3 jenis ukuran yaitu kecil untuk anak-anak, sedang atau medium untuk orang dewasa, dan

⁷¹ Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, *Kabupaten Gunungkidul*, dalam www.gunungkidulkab.go.id di akses pada tanggal 27 Desember 2018.

besar untuk ukuran jumbo. Ketiganya dapat dipilih dan disesuaikan dengan ukuran tubuh.⁷²

Di dalam Goa Pindul terdapat zona sempit yang hanya dapat dilewati oleh 1 ban saja, oleh karena itu wisata ini hanya menggunakan ban, bukan menggunakan sampan ataupun perahu karet. Keamanan dan kenyamanan ketika menyusuri Goa Pindul sangat terjamin karena didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, alat keamanan yang memadai, dan di pandu oleh para pemandu yang ramah dan profesional.⁷³

Goa Pindul terbagi menjadi 3 zona yaitu zona terang, zona remang, dan zona kegelapan abadi. Untuk dapat menyusuri Goa Pindul ini tidak ada batasan usia atau jumlah minimum pengunjung untuk menyusuri goa ini. Setiap wisatawan yang ingin menyusuri goa harus menggunakan *body safety* dan wajib didampingi oleh pemandu. Di dalam penyusuran Goa Pindul, wisatawan akan melihat beberapa stalagmit dan stalaktit yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Beberapa stalagmit dan stalaktit yang ada di dalam Goa pindul memiliki nama seperti stalagmit perkasa, stalaktiti mutiara, stalagtit *soko guru* (penyangga utama) yang menjadi stalaktit terbesar di Goa Pindul dengan ukuran lebar lima rentangan tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 7 meter, stalaktit batu tirai. Setelah melewati zona gelap dan sempit, wisatawan akan memasuki zona kelelawar yang menjadi zona terpanjang dan banyak kelelawar yang tinggal di zona ini. Di tengah goa terdapat ruang yang cukup besar dengan lubang di atasnya sehingga sinar matahari dapat masuk melalui lubang tersebut. Sebelum penyusuran mencapai *finish*, wisatawan tiba di goa vertikal dan akan melihat cahaya matahari yang nampak dari atas atau dikenal dengan istilah *The Hidden Paradise of Jogja*. Namun untuk dapat melihat cahaya tersebut wisatawan disarankan untuk berkunjung pada pukul 10.00-12.00 dengan cuaca cerah. Di goa

⁷² Wirawisata, Deskripsi Lengkap Obyek Wisata Goa Pindul Jogja, dalam www.pindul.net di akses pada tanggal 6 Januari 2019.

⁷³ Goa Pindul, dalam goapindul.com di akses pada tanggal 6 Januari 2019.

vertikal, wisatawan diperbolehkan untuk turun dari ban untuk berenang ataupun bermain air.

Goa Pindul terletak di Dusun Gelaran 2, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Luas wilayah Desa Bejiharjo 1.825,4825 Ha dengan jumlah penduduk 15.240 jiwa yang tersebar di 20 padukuhan. Desa bejiharjo terdiri dari 20 padukuhan, 20 Rukun Warga (RW), dan 144 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayahnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Desa Bejiharjo

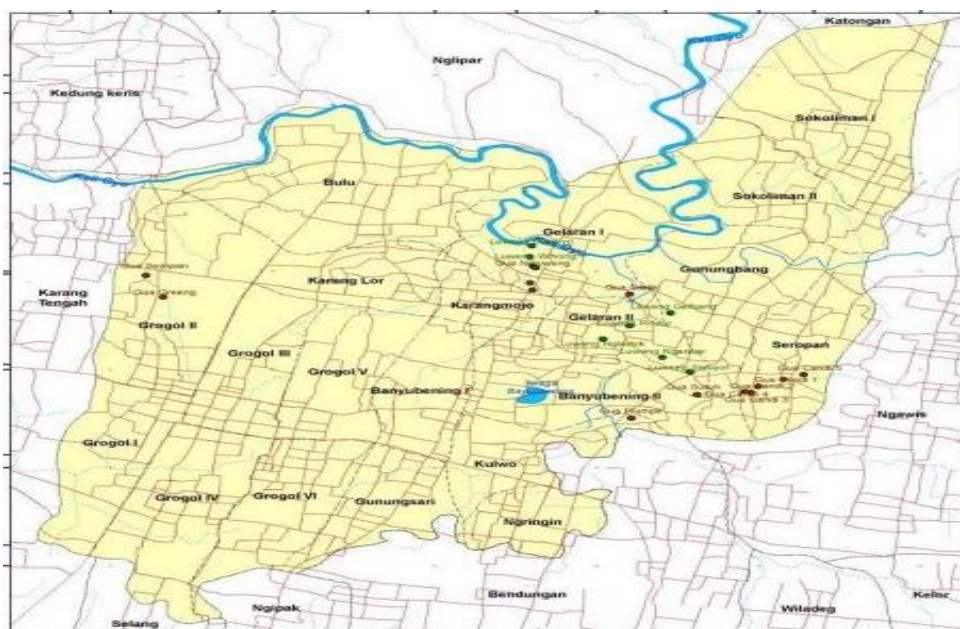
No	Padukuhan	Luas (Ha)	Jumlah	
			RW	RT
1	Grogol I	64,3235	1	6
2	Grogol II	104,918	1	6
3	Grogol III	79,25	1	7
4	Grogol IV	104,939	1	8
5	Grogol V	71,013	1	8
6	Grogol VI	83,474	1	10
7	Gunungsari	108,4495	1	6
8	Ngringin	75	1	10
9	Kulwo	75,485	1	6
10	Banyubening I	66,3425	1	4
11	Banyubening II	79,456	1	6
12	Karangmojo	73,845	1	12
13	Karanglor	130,9425	1	7
14	Bulu	99,7615	1	12
15	Gelaran I	133,185	1	8
16	Gelaran II	79,8945	1	4
17	Gunungbang	76,7065	1	6
18	Seropan	105,943	1	6
19	Sokoliman I	105,8865	1	6
20	Sokoliman II	114,6675	1	5
JUMLAH		18.254.825	20	144

Sumber: bejiharjo-karangmojo.desa.id

Kata Bejiharjo secara etimologis berasal dari kata Beji yang artinya adalah sumber air dan Harjo yang berasal dari Kerta Raharjo yang berarti subur makmur *loh jinawi*. Hal tersebut karena diharapkan Bejiharjo menjadi desa yang nantinya mampu menjadi sumber kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat.⁷⁴ Batas wilayah sebelah selatan adalah Desa Bendungan dan Desa Wiladeg, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngawis, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglipar, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosari.

Orbitasi (jarak ke pusat pemerintahan) ke ibukota kecamatan berjarak 4,5 Km, jarak ke ibukota kabupaten 6,6 Km, jarak ke ibukota provinsi 45 Km, dan jarak ke ibukota negara 707 Km. Topografi Desa Bejiharjo adalah dataran rendah dengan ketinggian tanah 100-250 mdpl. Banyaknya curah hujan adalah 180 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 28° C.⁷⁵



Gambar 4.2. Peta Teritorial Desa Bejiharjo

Sumber: bejiharjo-karangmojo.desa.id

4.1.3. Kondisi Demografi Desa Bejiharjo

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Bejiharjo adalah petani ladang tadah hujan, dan sebagian kecil merupakan petani sawah irigasi. Irigasi tersebut dengan memanfaatkan air sungai bawah tanah

⁷⁴ Pemerintah Desa Bejiharjo, *Sejarah Desa*, dalam <http://bejiharjo-karangmojo.desa.id/first/artikel/57> di akses pada tanggal 4 Desember 2018.

⁷⁵ Pemerintah Desa Bejiharjo, *Geografis Desa*, dalam <http://bejiharjo-karangmojo.desa.id/first/artikel/127> diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

yang muncul ke permukaan yang disebut sebagai Sumber Banyumoto atau lebih dikenal dengan Goa Pindul.

Rincian jumlah penduduk Desa Bejiharjo berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Bejiharjo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah	
		N	Prosentase
1	Laki-Laki	8382	50,06%
2	Perempuan	8362	49,94%
	Total	16745	100%

Sumber: bejiharjo-karangmojo.desa.id

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk Desa Bejiharjo berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Bejiharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah	
		N	%
1	Tidak/belum sekolah	4274	25.52%
2	Belum tamat SD/ sederajat	1603	9.57%
3	Tamat SD/ sederajat	4031	24.07%
4	SLTP/ sederajat	3363	20.08%
5	SLTA/ sederajat	3090	18.45%
6	Diploma I dan II	59	0.35%
7	Diploma III/ Akademi	97	0.58%
8	Diploma IV/ Strata I	211	1.26%
9	Strata II	13	0.08%
10	Strata III	3	0.02%
Total		16745	100%

Berdasarkan tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Bejiharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dapat di lihat bahwa sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Desa Bejiharjo adalah tidak/belum sekolah dan tamatan SD/ sederajat, namun ada pula yang menempuh jenjang

pendidikan hingga program doktoral atau Strata 3 (S3). Adapun jumlah penduduk Desa Bejiharjo berdasarkan profesi atau mata pencaharian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Bejiharjo Berdasarkan Profesi

No	Kelompok	Jumlah	
		N	%
1	Petani/Perkebunan	3483	20.80%
2	Belum/Tidak bekerja	3434	20.51%
3	Pelajar/Mahasiswa	2288	13.66%
4	Mengurus rumah tangga	2239	13.37%
5	Karyawan swasta	1815	10.84%
6	Buruh harian lepas	1635	9.76%
7	Wiraswasta	787	4.70%
8	Buruh tani/Perkebunan	248	1.48%
9	Pedagang	177	1.06%
10	Profesi lainnya	639	3.82%
	TOTAL	16745	100%

Sumber: bejiharjo-karangmojo.desa.id

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Bejiharjo berprofesi sebagai petani, mengurus rumah tangga, dan buruh harian lepas walaupun banyak pula yang belum/tidak bekerja. Disamping itu sebagian dari mereka juga mengurus ternak seperti sapi, kambing, domba, dan ayam. Profesi lainnya lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.

4.1.4. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.⁷⁶ Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari

⁷⁶ Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, (2012), hlm 11.

para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.⁷⁷ Adapun tujuan dibentuknya Pokdarwis adalah:

- 1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- 2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Syarat-syarat umum dalam keanggotaan Pokdarwis adalah bersifat sukarela, memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan, bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata, memiliki kepedulian terhadap pariwisata, memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁸ Sedangkan dalam proses pembentukannya, pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 pendekatan yaitu inisiatif dari masyarakat lokal dan inisiasi dari instansi terkait di bidang kepariwisataan.

⁷⁷ Kementerian Pariwisata..., hlm 16.

⁷⁸ *Ibid*, hlm 19.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Kondisi Relasional Antara Kelompok Sadar Wisata di Goa Pindul Pasca Penyelesaian Konflik

Kabupaten Gunungkidul memiliki keindahan alam berupa pantai yang sangat indah sehingga menjadi tujuan utama wisatawan berkunjung ke Gunungkidul. Hal tersebut menjadikan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul untuk menciptakan alternatif tempat tujuan pariwisata selain pantai. Kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mencoba menginisiasi potensi-potensi daya tarik wisata yang berada di jalur kunjungan menuju pantai, diantaranya adalah jalur dari arah Kota Jogja, dari arah Solo, dan dari arah Jawa Timur.

Pada tahun 2008 Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengadakan sosialisasi Desa Wisata di Rest Area Bunder Wonosari dengan mengundang para pelaku wisata di Kabupaten Gunungkidul, turut di undang pula pada waktu itu Subagyo atau yang lebih akrab di panggil Bagyo dan Kepala Dusun Gelaran Desa Bejiharjo.

Sosialisasi dari Dinas Pariwisata kabupaten Gunungkidul terus berlanjut hingga pada tahun 2009-2010 terdapat pembinaan Kelompok Sadar Wisata atau sering disingkat menjadi Pokdarwis. Bagyo yang awalnya merupakan pengelola Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) dan beberapa rekan mengikuti pembinaan Pokdarwis yang diadakan di Balai Dusun Gunungbang Desa Bejiharjo. Dalam pembinaan Pokdarwis tersebut ditugaskan untuk mengidentifikasi potensi pariwisata di daerah sekitar, mereka kemudian menonjolkan Goa Pindul untuk diajukan menjadi destinasi pariwisata. Da lam rencana pengembangannya mereka terinspirasi dari wisata yang ada di New Zealand dimana disana terdapat wisata penelusuran gua tetapi dengan menggunakan ban.

Dari beberapa proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul kemudian ditemukan beberapa titik yang sekiranya memiliki potensi dan daya tarik wisata sepanjang jalur yang dilewati menuju pantai, seperti jalur dari arah Kota Jogja menuju

pantai ditemukan Nglangeran dan Gunung Api Purba, kemudian jalur dari arah Jawa Timur melewati Pacitan menuju pantai ditemukan Kali Suci dan Goa Jomblang, dan jalur dari arah Solo menuju pantai ditemukan Goa pindul.



Gambar 4.3 Peta Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Goa Pindul yang terletak di Desa Bejiharjo, pada awalnya potensi Desa Bejiharjo adalah budaya sehingga ditetapkan sebagai Desa Budaya melalui surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 325/KPTS/1995 tentang Penetapan 32 Desa sebagai Desa Bina Budaya.⁷⁹ Goa Pindul sejak dulu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk mandi, mencuci pakaian, memandikan hewan ternak dan mengairi lahan pertanian mereka. Mereka melakukan kegiatan tersebut di mulut gua dan

⁷⁹ Anonim. *Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul*, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bejiharjo,_Karangmojo,_Gunungkidul) diakses pada 2 Desember 2018.

pintu keluar gua, sedangkan di atas gua terdapat tanah milik Atik yang dipergunakan sebagai sarang burung walet sejak tahun 1998 namun usaha tersebut tidak berjalan lama dan kemudian terhenti.

Dari rangkaian pembinaan Pokdarwis di Desa Bejiharjo kemudian lahirlah Pokdarwis Dewa Bejo yang di ambil dari Desa Wisata Bejiharjo karena mengarah pada potensi-potensi wisata di Desa Wisata Bejiharjo. Pada tanggal 31 Juni 2010 resmi terbentuknya Pokdarwis Dewa Bejo dengan pengembangan destinasi wisata yaitu Goa Pindul yang beranggotakan 11 orang. Namun dari 11 orang tersebut yang aktif hanya 4 orang yaitu Bagyo sebagai Ketua Pokdarwis Dewa Bejo, Pramujji sebagai Sekretaris, Suratmin sebagai Bendahara dan Tukijo sebagai Ketua Pemandu. Hampir selama 4 bulan mereka berempat membersihkan area Goa Pindul, setelah dirasa bersih kemudian langkah selanjutnya adalah promosi dan pengenalan daya tarik wisata, mengekpos Goa Pindul ke luar wilayah Bejiharjo dengan menggunakan *leaflet* dan beberapa sosial media yang ada pada waktu itu. Goa Pindul diresmikan oleh Bupati Gunungkidul pada waktu itu yaitu Prof. Sumpeno (Alm) pada tanggal 10 Oktober 2010 sebagai tempat tujuan wisata dan di buka untuk umum.⁸⁰ Pada awal beroperasinya Goa Pindul menjadi tempat wisata mereka menggunakan peralatan-peralatan sederhana untuk menelusuri gua, seperti memanfaatkan kaleng drum bensin yang sudah tidak digunakan karena keterbatasan dana yang mereka miliki.

Selain usaha dalam bentuk operasional mereka juga berupaya keras untuk meyakinkan tokoh masyarakat atau sesepuh yang ada di desa karena mereka masih memiliki persepsi (sugesti) kejawen bahwa Goa Pindul itu sarangnya makhluk halus sehingga tidak boleh di buka untuk umum. Namun kemudian persepsi atau sugesti tersebut meluntur setelah mereka melihat dan merasakan keindahan Goa Pindul, mereka juga meyakinkan kepada para tokoh masyarakat dan sesepuh bahwa Goa Pindul adalah milik alam dan terbentuk karena alam sehingga akan

⁸⁰ Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul.

dikelola dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya.

Pada awal dibukanya Goa Pindul sebagai objek wisata, pengunjung dikenakan Rp. 35.000 pertiket untuk satu pengunjung. Selain pelayanan dan akses menyusuri Goa Pindul harga tersebut sudah termasuk satu porsi Bakso dan Teh Rosela, jumlah pengunjung yang datang ke Goa Pindul tidak mencapai 10 orang setiap minggunya, dapat kembali dilihat pada Tabel 1.1 Data Pengunjung dan Pendapatan Objek Wisata Goa Pindul. Pada tahun 2011 Goa Pindul mulai di kenal oleh masyarakat di luar wilayah Bejiharjo terlihat pada adanya peningkatan jumlah pengunjung.

Dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung secara otomatis pendapatan yang diperoleh Pokdarwis Dewa Bejo pun meningkat, dari situ kemudian mulai timbul kecemburuan sosial di masyarakat. Masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam pengelolaan Goa Pindul muncul keinginan untuk turut menikmati hasil dari Goa Pindul karena dalam kepengurusan Pokdarwis Dewa Bejo itu hanya beberapa orang yang terlibat sedangkan pendapatan Goa Pindul bagi masyarakat sekitar merupakan jumlah yang luar biasa. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Yudhi:

“Mulai tahun 2011 pertengahan terjadi *booming*, sebelum terjadi booming memang konflik itu tidak pernah ada karena pada saat itu orang-orang menganggap bahwa pindul yang notabene cuma tempat seperti itu (sederhana) kok bisa jadi tempat wisata yang menghasilkan uang sehingga belum terbersit konflik sama sekali. Nah, setelah booming pada tahun sekitar 2011 masyarakat sekitar pun mulai ikut melirik keberadaan Goa Pindul.” (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018)

Masyarakat sekitar mulai merasa bahwa Goa Pindul hanya dinikmati oleh beberapa orang sedangkan beberapa masyarakat di sana yang kemudian ingin masuk ke Pokdarwis Dewa Bejo sangat sulit, oleh karena itu kemudian mereka berinisiatif untuk membuat Pokdarwis lain maka timbullah Pokdarwis baru yaitu Pokdarwis Wira Wisata. Pokdarwis

Wira Wisata terbentuk atas kesadaran kelompok pemuda di Dusun Gelaran II. Yudhi mengatakan bahwa jika berdirinya Pokdarwis Wira Wisata itu lebih memberdayakan masyarakat sekitar karena yang terlibat dalam Pokdarwis tersebut cukup banyak dan pemerataan penghasilan lebih terlihat.

Dengan adanya dua Pokdarwis di Desa Bejiharjo yang melayani wisatawan ke Goa Pindul maka mulai timbul persaingan diantara keduanya. Dengan berkembang Goa Pindul dan semakin meningkatnya jumlah pengunjung yang datang maka semakin bermunculan pula lah Pokdarwis di Desa Bejiharjo dan turut melayani wisatawan yang datang ke Goa Pindul, diantaranya adalah dengan adanya Pokdarwis Panca Wisata dan Pokdarwis Tunas Wisata.

Dengan adanya beberapa Pokdarwis yang turut mengelola Goa Pindul sehingga terjadilah persaingan untuk mendapatkan wisatawan, karena belum adanya manajemen yang baik dan regulasi yang jelas dari pemerintah terkait dengan pengelolaan kepariwisataan maka di Goa Pindul kemudian mulai timbul beberapa masalah terkait dengan pengelolaan dan manajemen Goa Pindul. Seperti fenomena yang terlihat dari gambar berikut:



Gambar 4.4 Pengunjung Goa Pindul Membludak⁸¹

⁸¹ Foto tersebut di ambil dari Facebook dengan akun Backpacker Nusantara yang di upload pada tanggal 2 Mei 2015. 355 komentar, 799 dibagikan di akses pada 4 Desember 2018.



Gambar 4.5 Goa Pindul Melebihi Kapasitas Pengunjung

Sumber: regional.kompas.com⁸²

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa dengan adanya beberapa operator yang melayani wisatawan ke Goa Pindul namun belum dikelola dengan baik maka menimbulkan para operator dapat dengan bebas mengakses pengunjung untuk dibawa ke Goa Pindul sehingga menimbulkan kelebihan kapasitas pengunjung di Goa Pindul. Melihat dari peraturan perundangan daerah yang berlaku pada waktu itu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata. Dalam perda tersebut belum mengatur secara terperinci terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan, perda tersebut hanya mengatur mengenai usaha di bidang pariwisata sehingga setiap kelompok masyarakat dapat dengan leluasa mendirikan usaha pariwisata tanpa adanya pembatasan maka wajar jika banyak bermunculan Pokdarwis-Pokdarwis di Desa Bejiharjo.

Untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul secara umum dan di Desa Bejiharjo secara khusus maka perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan

⁸² Anonim, Libur Panjang, Pengunjung Berjubel di Goa Pindul, dalam <https://regional.kompas.com/read/2017/04/23/17070051/libur.panjang.pengunjung.berjubel.di.goa.pindul> 23.04.2017 di akses pada 4 Desember 2018.

kepariwisataan, dengan pertimbangan tersebut kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Di tahun yang sama Bupati Gunungkidul mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Namun kehadiran Perda dan perbup tersebut belum dapat mengatasi permasalahan di Pindul secara tuntas.

Lebih spesifik dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata”. Hal tersebut menjadikan polemik baru, kenyataan di lapangan bahwa jumlah Pokdarwis di Desa Bejiharjo sudah lebih dari 1 Pokdarwis dan semuanya melayani wisatawan yang datang ke Goa Pindul. Imbas dengan adanya Perda dan Perbup tersebut adalah keempat Pokdarwis yang melayani wisatawan ke Goa Pindul yaitu Pokdarwis Dewa Bejo, Pokdarwis Wira Wisata, Pokdarwis Panca Wisata, dan Pokdarwis Tunas Wisata kemudian melebur menjadi satu melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Dari peleburan tersebut kemudian nama dari keempat Pokdarwis pun berubah dari Pokdarwis Dewa Bejo berganti nama menjadi Pokdarwis

Dewa Bejo I, Pokdarwis Wira Wisata berganti nama menjadi Pokdarwis Dewa Bejo II, Pokdarwis Panca Wisata berganti nama menjadi Pokdarwis Dewa Bejo III, dan Pokdarwis Tunas Wisata berganti nama menjadi Pokdarwis Dewa Bejo IV. Hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya sehingga Goa Pindul adalah destinasi wisata Pokdarwis Dewa Bejo.

Setelah adanya peraturan-peraturan tersebut wisatawan yang berkunjung ke Goa Pindul masih meningkat dan berdampak pula pada perkembangan jumlah Pokdarwis di Desa Bejiharjo namun bagi kelompok masyarakat yang ingin mendirikan Pokdarwis maka sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya Pasal 3 Ayat (2) harus memiliki destinasi wisata.

Beberapa Pokdarwis pun mulai menggali beberapa potensi wisata yang ada di Desa Bejiharjo sehingga dapat ditemukan Pokdarwis Karya Wisata dengan destinasi wisata Goa Sriti, Pokdarwis Gelaran Indah dengan destinasi wisata Goa Kristal, Pokdarwis Mriwis Putih dengan destinasi wisata Telaga Mriwis Putih, Pokdarwis Dewi Taliman dengan destinasi wisata Situs Sokoliman, Pokdarwis SBM dengan destinasi wisata Goa Gelatik, Pokdarwis Ngancar Wisata dengan destinasi wisata Goa Si Oyot, Pokdarwis Tiga Tugu Abadi dengan destinasi wisata Goa Emas. Namun, ikon Desa Bejiharjo adalah Goa Pindul maka sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa “Kelompok Sadar Wisata antara satu dengan yang lainnya dapat melakukan kerjasama”.

Kerjasama yang ada adalah masing-masing tiap Pokdarwis memiliki destinasi wisata tetapi karena tujuan wisatawan yang datang ke Desa Bejiharjo adalah ke Goa Pindul sehingga destinasi yang mereka miliki dipaketkan dengan Goa Pindul agar destinasi mereka juga laku oleh pengunjung. Teknisnya adalah ketika ada pengunjung dari Pokdarwis selain Dewa Bejo yang ingin berkunjung ke Goa Pindul maka pengunjung atau wisatawan diarahkan ke Pokdarwis Dewa Bejo dan dilayani oleh Pokdarwis Dewa Bejo, namun ketika ada pengunjung dari Pokdarwis Dewa Bejo yang ingin berkunjung ke destinasi wisata selain Goa Pindul maka diarahkan dan dilayani oleh Pokdarwis yang bersangkutan. Contohnya seperti ini: ketika pengunjung dari Pokdarwis Mriwis Putih ingin ke Goa Pindul maka diarahkan ke Pokdarwis Dewa Bejo dan dilayani oleh Pokdarwis Dewa Bejo, ketika ada pengunjung dari Pokdarwis Dewa Bejo ingin ke Goa Sriti maka diarahkan ke Pokdarwis Karya Wisata dan dilayani oleh Pokdarwis Karya Wisata.

Namun karena tujuan utama pengunjung yang datang adalah ke Goa Pindul sehingga kerjasama yang disebutkan di atas dirasa hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu Pokdarwis Dewa Bejo. Dari hal tersebut kemudian disepakati adanya pembagian *fee*. Seperti yang disampaikan oleh Tukiman (bukan nama sebenarnya):

“Akhirnya disepakati pada waktu itu *fifty-fifty*. Pertama dari tarif masuk wisatawan Rp.35.000 itu ketika ada tamu yg datang ke goa pindul, Rp.17.500 masuk ke saya dan Rp.17.500 lagi masuk ke dewa bejo. Tetapi tidak seperti janji semula karena mas Bagyo itu berjanji harus *fifty-fifty* karena yang melayani wisatawan itu dia. Pemanduan itu yang menangani dia, asuransi itu ditanggung oleh dia. Seharusnya memang seperti itu, tetapi setelah saya amati pengeluaran ke pemanduan saya kok banyak sekali. Ternyata saya tanya ke pemandunya, pengunjung saya yang ke Pindul itu pemandunya tetep dari saya terus. Makanya saya dengan berbagai upaya melakukan protes, pernah saya diskors ga boleh masuk selama 1 minggu oleh mas Bagyo karena saya ga manut aturannya beliau. Akhirnya negosiasi dan disepakati Rp.10.000 untuk bagian Dewa Bejo. Dia membuat aturan sendiri, karena dia merasa Pindul punya dia. Kesepakatan Rp.10.000 itu pun bertahap. Dari Rp.17.500 turun jadi

Rp.15.000, turun lagi jadi Rp.12.500, dan terakhir turun jadi Rp.10.000". (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018)

Permasalahan terkait dengan teknis manajemen wisatawan belum menemukan jalan keluar masalah dan menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dan beberapa dinas terkait. Hingga tahun 2016 setidaknya terdapat 11 Pokdarwis di Desa Bejiharjo yang melayani jasa pramuwisata kepada para wisatawan yang datang ke Goa Pindul. Pengamatan dari peneliti adalah dari awal dibukanya Goa Pindul sebagai tempat wisata pada tahun 2010 hanya terdapat satu Pokdarwis yang terbentuk di Desa Bejiharjo yaitu Pokdarwis Dewa Bejo yang saat ini dikenal sebagai Pokdarwis Perintis Goa Pindul. Semakin bertambah tahun Goa Pindul semakin berkembang dan menarik banyak wisatawan, pendapatan yang diperoleh dari Goa Pindul menjadi sangat menggiurkan dan membuat banyak pihak ingin terlibat dalam usaha pengembangan wisata di Goa Pindul, dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Goa Pindul maka semakin banyak pula Pokdarwis yang terbentuk di Desa Bejiharjo. Dari beberapa Pokdarwis tersebut kemudian timbul permasalahan terkait dengan persaingan dalam mendapatkan pengunjung.

Permasalahan utama yang terjadi adalah terkait dengan penerapan ataupun implementasi Pasal 3 ayat (2) belum bisa dilaksanakan secara tegas. Hal tersebut membuat Kapolres Gunungkidul yang pada waktu itu di jabat oleh AKBP Nugrah Trihadi turun tangan untuk memediasi beberapa Pokdarwis yang berseteru melalui penandatanganan kesepakatan antar pengelola yaitu Nota Kesepakatan Antara Kelompok Sadar Wisata di Desa Bejiharjo Tentang Kontribusi Masuk Destinasi Wisata Di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Nomor: B/01/IX/2016. Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh 9 pihak yaitu Pokdarwis Dewa Bejo, Mriwis Putih, Gelaran Indah, Sumber Banyu Moto, Ngancar Wisata, Sadam Wisata, Karya Wisata, Goa Mas Adventure, dan Dewi Taliman. Tujuan nota kesepakatan kerjasama pada Pasal 2 sebagai

pedoman para pihak dalam menyelenggarakan kontribusi masuk destinasi wisata di Desa Bejiharjo.

Kewajiban para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama disebutkan pada Pasal 5 Point (a) bahwa “PARA PIHAK dalam memasukkan wisatawan ke destinasi wisata kecuali ke Gua Tanding disepakati membayar kontribusi sebesar RP.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kepada Pokdarwis yang mengelola destinasi wisata tersebut. Masih di Pasal yang sama Point (c) disebutkan pula bahwa “Tarif masuk destinasi wisata Goa Pindul sebesar Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah).”

Semua pihak dan *stakeholder* yang terkait berharap bahwa permasalahan di Goa Pindul terselesaikan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan yang dimediasi oleh Kapolres Gunungkidul. Namun seiring berjalannya waktu ada pihak yang melanggar kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan kekisruhan di area Goa Pindul.

Dalam pemberitaan media tersebut disebutkan bahwa kisruh tersebut terjadi salah satu operator melanggar perjanjian yaitu memasukkan wisatawan ke Goa Pindul tanpa melalui Pokdarwis Dewa Bejo, hal tersebut mengindikasikan adanya pihak yang tidak menyepakati hasil perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya terkait dengan kewajiban, tarif, dan kerjasama. Namun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Harry Sukmono segera melakukan mediasi untuk meredakan ketegangan yang terjadi dengan mengundang semua operator Goa Pindul. Hasil dari mediasi adalah seluruh operator sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan tersebut dan kembali menaati hasil perjanjian sebelumnya.⁸³

⁸³ Rfk. Kisruh Antar-Operator Gua Pindul Kembali Memanas, Ketegangan pun Sempat Terjadi dalam <http://jogja.tribunnews.com/2017/04/19/kisruh-antar-operator-gua-pindul-kembali-memanas-ketegangan-pun-sempat-terjadi> diakses pada 5 Desember 2018.

Satu bulan setelah mediasi dengan Harry Sukmono TribunJogja.com kembali memberitakan adanya operator di Goa Pindul yang melanggar Nota Kesepakatan yaitu operator Gelaran Indah. Mengenai hal tersebut dapat kembali dilihat pada Gambar 1.1. Laporan TribunJogja.com.

Pada saat penelitian ini dilakukan, pengelolaan Goa Pindul sudah diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bejiharjo yaitu BUMDes Maju Mandiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Bejiharjo, Yanto. Ia menambahkan bahwa:

“...masalah yang kami anggap penting tetapi bisa diselesaikan itu terkait dengan pengelolaan. Dikelola pihak ini tidak terima, dikelola pihak itu tidak terima karena kan ada cemburu sosial. Bupati mencoba *ura rampung*, Kapolres mencoba *ura rampung*, *akhire rampunge* tetep dengan pemerintah desa dengan adanya bumdes, seperti itu kesimpulannya. Nah BUMDes kan terakhir itu ada kesepakatan-kesepakatan terkait dengan perjanjian kerjasama dan lain sebagainya.” (Wawancara pada tanggal 13 November 2018)

Menurut Yanto adanya BUMDes merupakan merupakan solusi dari konflik antar operator yang terjadi di Goa Pindul ataupun jalan tengah dari permasalahan yang ada di Goa Pindul terkait dengan pengelolaan pariwisata sehingga kondisi Goa Pindul saat ini terkondisikan dengan aman. Lebih lanjut hasil wawancara peneliti dengan Direktur BUMDes Maju Mandiri, Sariyanto:

“...dalam mengelola Goa Pindul tidak sepenuhnya dikelola oleh Bumdes Maju Mandiri, untuk pelayanan wisatawan Bumdes Maju Mandiri bekerja sama dengan Unit Pelayanan Pokdarwis atau yang sering disebut operator yang ada di Desa Bejiharjo. Adapun Pokdarwis di Desa Bejiharjo yang tercatat di Bumdes berjumlah 11 Pokdarwis yaitu Pokdarwis Dewa Bejo, Pokdarwis Karya Wisata, Pokdarwis Tunas Wisata, Pokdarwis Panca Wisata, Pokdarwis Wira Wisata, Pokdarwis Gelaran Indah, Pokdarwis Ngancar Wisata, Pokdarwis Mriwis Putih, Pokdarwis Sumber Banyu Moto (SBM), Pokdarwis Dewi Taliman dan Pokdarwis Tiga Tugu Abadi.” (Wawancara pada tanggal 19 November 2018)

Dengan berdirinya BUMDes Maju Mandiri di Desa Bejiharjo maka secara otomatis Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Polres

Gunungkidul sudah tidak berlaku. Disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) Nota Kesepakatan Antara Kelompok Sadar Wisata di Desa Bejiharjo Tentang Kontribusi Masuk Destinasi Wisata Di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Nomor: B/01/IX/2016 bahwa “Nota kesepakatan ini berlaku sejak nota kesepakatan kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan sampai BUMDes terbentuk”. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Industri dan Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Eli Martono mengatakan “...Nota Kesepakatan tersebut tidak berlaku dengan sendirinya ketika Bumdes Bejiharjo terbentuk...”

BUMDes Bejiharjo dengan nama Bumdes Maju Mandiri diresmikan pada tanggal 16 Desember 2016, adapun izin Bumdes Maju Mandiri terkait dengan pengelolaan wisata Goa Pindul adalah:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) daya tarik wisata Goa Pindul
2. TDUP wisata tirta
3. Pemanfaatan permukaan air tanah
4. Izin lingkungan
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Namun dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa operator di Goa Pindul, terdapat beberapa pihak yang pro dan kontra dengan berdirinya BUMDes Maju Mandiri. Sikap pro terlihat dari pernyataan Tukiman (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018), ia mengatakan “...kalau menurut saya sudah 80% dengan keberadaan BUMDes, tapi masih ada beberapa yang (harus) dibenahi. Dengan keberadaannya BUMDes itu sudah dapat mengatur, antara lain ya mengatur pola komunikasi antar Pokdarwis dengan baik karena dapat menenangkan semua (pihak)...”. Hal serupa juga dikemukakan oleh Parmin (bukan nama sebenarnya, wawancara pada tanggal 10 Oktober 2018) “...kalau saat ini setelah di pegang bumdes, agak reda sedikit. Secara umum sudah tertib, (karena) pandangan saya itu yang paling efektif (bagi pengelolaan Goa

Pindul)...”. Guntur (wawancara pada tanggal 11 Oktober 2018) juga mengatakan “Ya dengan hadirnya BUMDes sedikit membantu saya, kami, dan beberapa operator lainnya. Sedikit membantu”. Begitupula yang disampaikan oleh Gimu:

Kalau menurut saya baik, artinya sudah tidak ada yang berebut masalah ini dan itu sudah tidak ada. Kalau menginginkan peningkatan pelayanan terhadap pengunjung silahkan masing-masing (operator) memberikan pelayanan terbaik sebagai persaingan dimana kelompok yang baik pelayanannya kan pengunjung lebih senang. Kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan ataupun sarana dan prasarana sekarang itu sudah di atasi oleh BUMDes. Jadi yang bertanggungjawab adalah BUMDes... (Wawancara pada tanggal 13 Oktober 2018)

Ramiyanto (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2018) mengatakan bahwa dengan adanya BUMDes saat ini terdapat program simpan pinjam seperti yang disampaikan kepada peneliti “...di BUMDes sendiri sekarang diadakan simpan pinjam untuk semua operator. Mungkin bagi operator yang kekurangan peralatan atau mungkin dananya minim maka boleh minjam di bumdes...”. Tukino (bukan nama sebenarnya) menyambut positif mengenai keberadaan BUMDes bahkan memberikan penjelasan terkait dengan cara kerja BUMDes, ia mengatakan:

Dengan adanya bumdes jadi gini mbak, adanya kita sebagai operator diwajibkan dari hasil penjualan tiket yang Rp.40.000 itu kan kita kembalikan ke BUMDes RP.5.000/orang. Untuk sementara ini kan baru 2 tahun BUMDes berdiri, hasil Rp.5.000 itu ya kembalinya ke desa. Sekarang sudah untuk pembangunan di Pindul seperti membangun tanggul supaya tidak terjadi erosi di Pindul. Timbal baliknya dari BUMDes ya memberikan fasilitas-fasilitas desa, termasuk juga beberapa pembetulan di Goa Pindul. (wawancara 13 Oktober 2018)

Namun hal berbeda disampaikan oleh Paijo (bukan nama sebenarnya, wawancara pada tanggal 11 Oktober 2018), ia mengatakan “...terkait dengan fasilitas pendukung di tempat wisata belum ada program, belum ada action, belum ada bentuk riil dari BUMDes...”. Tukidi (bukan nama sebenarnya, wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018) mengatakan

bahwa “Kalau bisa di rubah. Kalau dulu itu sebelum BUMDes mengeluarkan aturan mungkin masih enak tetapi sekarang sudah terlanjur jadi tidak bisa berbuat banyak. Jadi karena ada aturan dari BUMDes itu maka sudah di rusak semua...”. Parjo (bukan nama sebenarnya) bahkan mengeluhkan dengan adanya BUMDes, ia mengatakan:

...tapi ini bukan bisa buat pedoman ya mbak tapi ini fakta. Jadi selama 2 tahun ini saya akui pengunjung di Goa Pindul itu turun *down* sekitar 75%. Nah saya sendiri juga bingung, apakah ini juga kebetulan pas berdirinya BUMDes atau memang kepopuleran Pindul sudah menurun, susah untuk dirumuskan. Itu setelah 2 tahun berdirinya BUMDes saya akui jumlah pengunjung di Goa Pindul menurun drastis. *Saiki wis di cekel BUMDes luwih-luwih, ngunu-ngunu, nek enek piye-piye gur ke BUMDes. Tapi ternyata BUMDes yo ura kuat, kan seperti itu. Dia (BUMDes) ggondeli duite kuat tapi ggon perkarane ura kuat.* (Sekarang sudah di kelola BUMDes lebih-lebih seperti itu kalau ada permasalahan lapornya ke BUMDes tetapi ternyata BUMDes belum cukup memiliki power. Minta uangnya dia kuat tapi untuk menangani permasalahan yang timbul dia masih lemah). (wawancara 11 Oktober 2018)

Hal serupa juga dikeluhkan oleh Pardiyo (bukan nama sebenarnya), ia mengatakan:

...Saya itu kalau kegiatan BUMDes itu pesimis. Gambarannya saja seperti ini, ada aturan dari BUMDes terkait dengan SOP yang dari BUMDes bahwa yang bisa memandu di Goa Pindul itu pemandu yang bersertifikasi, itu jelas. Saya demo 1 kali, saya menuntut supaya cepat diberlakukan karena ini sudah aturan dari bumdes, sampai sekarang juga tidak jalan. (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengamati bahwa 11 operator ataupun Pokdarwis yang ada di Bejiharjo khususnya yang menyediakan jasa pramuwisata ke Goa Pindul terbagi ke dalam dua kelompok atau kubu yang berbeda dan saling bertolak belakang. Yaitu kelompok perintis dan kelompok bukan perintis.

Banyaknya Pokdarwis yang membuka jasa pramuwisata ke Goa Pindul tidak menampik kemungkinan bahwa mereka memiliki tujuan tertentu. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 10 Pokdarwis terkait

dengan tujuan mereka ikut serta menyediakan jasa pramuwisata ke Goa Pindul. Dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yudhi mengatakan:

Awal mulanya akses menuju pindul itu jelas melewati (wilayah tempat tinggal) kami, jadi mau tidak mau membuat kebisingan di tempat kami, resiko dan lain sebagainya. Kok kita cuma dapat bising, cuma dapat polusi, kenapa kita ga mencoba untuk ikut menikmati dengan keberadaannya Goa Pindul. Pendapatan masyarakat kami itu kan mayoritas dari petani, buruh yang penghasilannya tidak seberapa dan tidak menentu. Akhirnya saya juga memiliki keinginan untuk menaikkan taraf hidup mereka... (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018)

Kemudian Sukijat yang diwawancari oleh peneliti pada tanggal 9 Oktober 2018 terkait dengan tujuan ikut serta mengelola Goa Pindul mengatakan:

Tujuan saya adalah untuk mensejahterakan masyarakat disamping untuk mengurangi pengangguran. Masyarakat di Goa Pindul ini bisa ikut merasakan (adanya Goa Pindul) itu aja, disamping itu juga untuk menyerap tenaga kerja bukan hanya dari Gunungbang saja tetapi karyawan kami ada yang dari Nglipar, Semanu, Semin dan sekitarnya. Malahan untuk pemandu dari Gunungbang sendiri cuma ada 2 atau 3 orang. (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018)

Jawaban Ramiyanto ketika diwawancari oleh peneliti pada tanggal 10 Oktober 2018 terkait dengan tujuan ikut serta mengelola Goa Pindul, ia mengatakan:

...tujuannya untuk memberdayakan masyarakat mbak. Jadi kalau di lingkungan disini kan mayoritas kan (bekerja) di sawah, ladang kering, bertani. Dengan adanya Goa Pindul ini jadi mereka selain mengerjakan tanah-tanah untuk bercocok tanam, di daerah sini orang yang berpotensi atau mampu ya kita kerahkan di wisata ini. Ya di posisi pelampung, bersih-bersih, kepeemanduan atau mengkondisikan fasilitas yang ada. Terus yang di luar (sekretariat) sana ada kemampuan (tenaga maupun finansial) bisa jualan di sekitar depan ya dipersilahkan, rumah masyarakat sekitar yang layak untuk nginap kita jadikan *homestay* jadi nanti kalau ada tamu nginap ya kita bagi-bagi. Jadi pada intinya adalah memberdayakan masyarakat setempat.

Sutiman ketika diwawancari oleh peneliti pada tanggal 10 Oktober 2018 terkait dengan tujuan ikut serta mengelola Goa Pindul mengatakan “...kita sebagai penduduk sini kok cuma melihat, akhirnya sama teman-teman timbul inisiatif untuk ikut mendirikan Pokdarwis barangkali nanti bisa mengurangi pengangguran...”. Gunadi ketika diwawancari oleh peneliti pada tanggal 11 Oktober 2018 menyebutkan beberapa faktor yang melatarbelakangi keinginan untuk membentuk Pokdarwis di Goa Pindul, ia menyebutkan:

...Pertama kita di lingkungan Daerah Tujuan Wisata (DTW) masa iya cuma mau jadi penonton. Sumber daya manusianya ada, sumber daya alamnya ada, kenapa kita tidak ikut mendirikan sebuah kelompok sadar wisata toh pemerintah juga tidak melarang, cuma 100 meter (ke Goa Pindul), tergiur dengan pemasukan yang ada, daripada kita bekerja dengan orang lain yang sudah ada kelompoknya lebih baik membentuk kelompok sendiri. Kedua, untuk memberikan mata pencaharian di lingkungan sekitar. Ibu rumah tangga bisa membuka *catering*, orang yang dulu bekerja sebagai buruh pertanian bisa menjadi pemandu dengan bayaran yang lebih besar, yang tidak mau kemana-mana karena takut air ya bisa menjadi tukang ban atau pengusung dengan gaji UMR, ibu-ibu yang dulunya buruh tani bisa menyewakan waterproof dengan keuntungan Rp.2000-Rp.10.000 perbuah, halaman rumah yang luas bisa dijadikan tempat parkir nanti tinggal disesuaikan tarifnya, sewa kamar mandi dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itulah yang mendorong kami untuk menciptakan sebuah kelompok yang ada..

Budi ketika diwawancari oleh peneliti pada tanggal 11 Oktober 2018 terkait dengan tujuan ikut serta mengelola Goa Pindul mengatakan:

...konsep saya adalah Pokdarwis itu untuk pemberdayaan masyarakat karena untuk wilayah kami itu juga termasuk dusun tertinggal. Lah kenapa ada potensi seperti itu tidak kita manfaatkan seperti itu. Kalau dulunya itu orang-orang desa pergi ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya untuk *berboro*, lah prinsip saya *kepiye carane saiki sing wong kota ben iso nang ndeso genten* (prinsip saya bagaimana caranya sekarang orang yang hidup atau tinggal di kota bisa gantian hidup atau tinggal di desa), itu pada dasarnya seperti itu. Jadi memang dari awal itu strategi saya seperti itu. Jadi saya mau merubah masyarakat saya biar jadi masyarakat yang maju jadi ekonominya kan terangkat, seperti itu. Itu memang dari konsep awal sampe sekarang seperti itu. Jadi konsepnya pemberdayaan

masyarakat jadi yang saya libatkan untuk yang kerja disini masyarakat lingkup Dusun Gelaran 1 dan 2, Gunungbang secara umum adalah Desa Bejiharjo.

Guntur ketika diwawancari oleh peneliti pada tanggal 11 Oktober 2018 terkait dengan tujuan ikut serta mengelola Goa Pindul mengatakan "...meningkatkan kualitas wisata gua pindul ee nanti saya buka. Tujuan saya ya menyejahterakan organisasi saya itu jelas secara garis besar seperti itu. Ya pengen organisasi saya yang memiliki anggota itu pengen sejahtera dan melestarikan wisata alamnya". Kemudian ada Sigito yang diwawancari oleh peneliti pada tanggal 13 Oktober 2018 mengenai tujuan untuk ikut serta mengelola Goa Pindul mengatakan:

Tujuan saya tidak semata-mata untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya kelompok itu enggak mb, kita memberdayakan masyarakat khususnya di Gelaran Bejiharjo ini biar semua tingkat kehidupannya bisa meningkat dan merata. Tidak ada kesenjangan. Ibu-ibu disini itu mbak meskipun seperti ini kita masih ada *cost* hasil yang kita ambil dari Goa Pindul itu juga kita bagi-bagi. Contohnya untuk kesejahteraan karyawan dan pemandu, kita juga memberikan kepada yatim piatu, jompo, kegiatan Karang Taruna, kegiatan RT, kita semuanya kita adakan. (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2018)

Gimu ketika diwawancari oleh peneliti pada tanggal 13 Oktober 2018 terkait dengan tujuan ikut serta mengelola Goa Pindul mengatakan "Tujuannya ya pertama untuk memberdayakan masyarakat, memberikan lapangan kerja kepada para pengangguran, demi kemakmuran masyarakat semuanya". Dan terakhir adalah Bagyo yang diwawancari oleh peneliti mengenai tujuan membuka jasa pramuwisata ke Goa Pindul, ia mengatakan:

Memang awalnya dusun sini kan banyak pengangguran lalu kemudian timbul keinginan saya pribadi karena saya juga pengangguran tow, saya menginginkan anak muda pada bekerja tapi lantaran apa nah saya mendirikan Pokdakan awalnya kelompok pembudi daya ikan, tapi itu yang mau cuma sedikit jadi kita harus bermain lumpur, bermain kotoran kan kalau di Pokdakan itu akhirnya beralih ke Pokdarwis. (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2018)

Dari peleburan itu timbul kecemburuan dari salah satu Pokdarwis, hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Tukino selaku pengurus salah satu Pokdarwis di Bejiharjo saat diwawancarai peneliti pada tanggal 13 Oktober 2018 di kantor sekretariatnya mengatakan bahwa peraturan daerah tentang kepariwisataan sosialisasinya sangat mendadak, paling tidak seharusnya satu atau dua tahun setelah disosialisasikan peraturan daerah baru dilaksanakan karena jika diberlakukan secara tiba-tiba maka peraturan daerah yang baru muncul namun segera dilaksanakan maka pasti menimbulkan gejolak di masyarakat.

Tukino menjelaskan bahwa pada waktu disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, baru terdapat 5 sekretariat Pokdarwis di Goa Pindul. Dengan adanya peraturan daerah tersebut kemudian empat Pokdarwis bergabung menjadi satu tetapi dengan ijinnya sendiri-sendiri, namun mereka mengatakan keempat Pokdarwis itu menjadi satu yaitu Dewa Bejo. Sebagai Pokdarwis kelima, Tukino merasa diperlakukan berbeda karena tidak diikut sertakan menjadi satu dengan Dewa Bejo. Ia mengajukan protes, jika memang 4 operator menjadi satu maka seharusnya menjadi satu manajemen, satu ketua, satu sekretariat, pengelolaannya juga jadi satu, semuanya menjadi satu. Tetapi mereka tidak, mereka tetap melakukan semuanya masing-masing. Ia mengatakan:

...Akhirnya ya sempat ada aturan kalau tamu dari Gelaran Indah, SBM, Karya Wisata, Mriwis Putih kalau mau ke pindul harus lewat Dewa Bejo dengan syarat satu orang pengunjung dikenakan Rp.10.000 untuk Dewa Bejo. Dalam hati saya *enak emen*, seperti itu saya tidak mau namun akhirnya 6 bulan saya juga gabung...(wawancara pada 13 Oktober 2018)

Tukino menambahkan bahwa hingga pada akhirnya pemerintah daerah berinisiatif untuk mempertemukan 11 operator Goa Pindul di Polres Gunungkidul yang kemudian tercapailah sebuah kesepakatan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak operator yang melakukan protes jika dikenakan tarif Rp.10.000 untuk bisa mengakses

Goa Pindul merasa keberatan. Dengan rincian, harga tiket masuk Goa Pindul Rp.35.000/wisatawan, kemudian di potong Rp.10.000 untuk disetorkan kepada Dewa Bejo. Sedangkan dari Rp.10.000 itu mereka tidak mendapatkan timbal balik apa-apa. Hanya sekedar setor tarif dan pemandu tetap dari masing-masing Pokdarwis. Menurutnya, BUMDes merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kekacauan di Goa Pindul karena memang seharusnya hanya ada satu manajemen yaitu BUMDes.

Namun hasil wawancara dengan Paijo selaku pengurus salah satu Pokdarwis di Bejiharjo saat diwawancarai peneliti pada tanggal 11 Oktober 2018 di kantor sekretariatnya terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul seolah-olah memberikan balasan terhadap tanggapan dari Tukino. Paijo mengatakan bahwa Dewa Bejo itu merupakan ikon Goa Pindul, oleh karena itu Dewa Bejo dibentuk 1 sampai 4. Pokdarwis tetap 1, cuma ketua unit usahanya berada disitu dan ketua Pokdarwis membawahi 4 sekretariat sehingga terjadi salah pahamnya itu disini. Ia menjelaskan, atas saran dari Hidayat, SH selaku pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat membedakan antara Pokdarwis dan Unit Usaha. Pokdarwis merupakan kelompok kemasyarakatan sehingga bersifat non profit, sedangkan Unit Usaha harus memiliki badan hukum yang dapat melindungi usaha tersebut.

Mengutip Hidayat, S.H yang disampaikan oleh Paijo yang mengatakan bahwa seharusnya ketua Pokdarwis Dewa Bejo 1-4 mencari akta sendiri-sendiri untuk bisa mendirikan unit usaha masing-masing yang Panca Wisata adalah Unit Usaha Panca Wisata begitu pula lainnya namun menggunakan nama Dewa Bejo 1, Dewa Bejo 2, Dewa Bejo 3 dan Dewa Bejo 4 karena Pokdarwisnya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 tahun 2014. Lebih lanjut Paijo menjelaskan jika Wira Wisata, Panca Wisata dan Tuas Wisata disendirikan tanpa menggunakan nama Dewa Bejo maka secara otomatis

tidak punya DTW (Daerah Tujuan Wisata) karena yang SBM dikasih Goa Gelatik, Ngancar Wisata adalah Goa Si Oyot, Mriwis Putih adalah Telaga, untuk Karya Wisata adalah Goa Sriti, untuk yang di Kedung Gupit Adventure goanya adalah Goa Emas yang ada di Seropan.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah ditampilkan maka temuan dari hasil penelitian terkait dengan kondisi relasional antara Pokdarwis pasca penyelesaian konflik adalah pada tanggal 24 September 2016, terdapat 9 pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan di Polres Gunungkidul yaitu Pokdarwis Dewa bejo, Mriwis Putih, Gelaran Indah, SBM, Ngancar Wisata, Sadam Wisata, Karya Wisata, Goa Mas Adventure, dan Dewi Taliman sedangkan untuk saat ini Pokdarwis yang aktif beroperasi berjumlah 11 Pokdarwis. Pokdarwis Sadam Wisata sudah tidak beroperasi dan Goa Mas Adventure berganti nama menjadi Tiga Tugu Abadi. Secara tidak resmi dari 11 Pokdarwis tersebut terbagi ke dalam 2 kubu yang berbeda atau saling bertentangan yaitu kelompok perintis dan kelompok bukan perintis.

4.2.2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Transformasi Konflik di Goa Pindul

Dalam menyelesaikan konflik antar pengelola Goa Pindul, pemerintah daerah maupun pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik hingga akhirnya dicapai penandatanganan perjanjian damai yaitu Nota Kesepakatan Antara Kelompok Sadar Wisata di Desa Bejiharjo Tentang Kontribusi Masuk Destinasi Wisata Di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Nomor: B/01/IX/2016 di Polres Gunungkidul pada tanggal 24 September 2016. Setelah adanya penandatanganan perjanjian tersebut kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bejiharjo untuk menjaga perdamaian atas perjanjian yang sudah disepakati antara Pokdarwis adalah dengan segera membentuk BUMDes, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Yanto selaku Kepala Desa Bejiharjo pada saat wawancara dengan peneliti:

“Kalau saya memang segera melangkah untuk tetap menjaga perdamaannya itu, bisa segala sesuatunya (terjaga perdamaannya) itu karena kita mendirikan BUMDes. BUMDes itu resmi berdiri tahun 2016 bulan Desember sedangkan perjanjian itu ditandatangani bulan September.” (wawancara pada tanggal 13 November 2018)

Sedangkan upaya yang dilakukan BUMDes untuk tetap menjaga perdamaian dan kerukunan antara operator adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan operator, sesuai dengan yang disampaikan oleh Sariyanto selaku Direktur BUMDes Maju Mandiri pada saat wawancara dengan peneliti:

Kita tetap komunikasi aja yg baik, baik lewat grup wa, tiap saat dikunjungi dsb. Terus ada masalah sekecil apapun langsung kita atasi. Caranya ya cuma itu komunikasi, jadi sekecil apapun belum sampai menjalar sudah kita atasi, kan tiap saat komunikasi tow. Apalagi kita juga punya petugas di lapangan dan ketua unit wisata kan selalu *muter* di kelompok-kelompok itu. (wawancara pada tanggal 19 November 2018)

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menjelaskan upaya yang dilakukan dalam transformasi konflik di Goa Pindul adalah dengan melakukan koordinasi dan pendekatan personal kepada pelaku-pelaku wisata di Goa Pindul serta memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan Pokdarwis.

...dengan selalu melakukan koordinasi, pendekatan personal, dan juga dengan membentuk *WhatsApp* (WA) grup. Hal tersebut kami lakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan disana dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Memberikan pemahaman kepada Pokdarwis yang ada di Bejiharjo bahwa mereka itu bukan pengelola suatu destinasi wisata tetapi mereka adalah suatu lembaga non profit yang kita bentuk di tingkat masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat juga untuk melaksanakan Sapta Pesona yang anggotanya adalah orang-orang pelaku usaha disitu. (wawancara pada tanggal 1 November 2018)

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam transformasi konflik di Goa Pindul yaitu dengan membangun komunikasi kepada pihak yang berseteru, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten

Gunungkidul. Hal tersebut disampaikan oleh Azman Latif selaku Asisten II Bupati Gunungkidul Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada saat wawancara dengan peneliti di Kantor Bupati gunungkidul, ia mengatakan:

...kita selama ini dialog-dialog terus, kalau kita kan misalnya kita evaluasi, kita monitoring kemudian kita evaluasi, nah kalau di sini kan kita melakukan evaluasi atas apa yang selama ini sudah dikerjakan, jadi saya kira sama tadi ketika kita mempertahankan kesepakatan, kita pun juga bagaimana sebenarnya terus membangun itu supaya ikatan diantara mereka itu semakin kuat. (wawancara pada tanggal 5 November 2018)

Adapun konfirmasi dari Kapolsek Karangmojo terkait dengan keterlibatan Polri dalam transformasi konflik di Goa Pindul, Kopol Sunaryo selaku Kapolsek Karangmojo mengatakan:

...karena kita hanya di luar saja, kita tidak ikut campur kedalam. Artinya ya kalau mereka bertanya ya kita menjelaskan oh ini tempatnya, arahnya sana, tapi kalau berkaitan kedalam intern mereka karena pariwisata disini kalau saya lihat dikelola BUMDes, yang notabene BUMDes kita tidak tahu menahu ya, itu ada pengelolaan, hasilnya ke Dispar dan ke pemerintah, kita ya hanya sebatas keamanan saja, memberi keamanan. (wawancara pada tanggal 13 November 2018)

Lebih lanjut Kopol Sunaryo bahwa pihak kepolisian sekedar melakukan pengamanan dan pengawasan di lokasi objek pariwisata Goa Pindul melalui Bhayangkara Bintara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Dari beberapa hasil wawancara yang telah ditampilkan maka temuan dari hasil penelitian terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Bejiharjo setelah penandatanganan Nota Kesepakatan di Polres Gunungkidul segera mengambil langkah cepat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Selain itu, pemerintah Desa Bejiharjo melakukan dialog-dialog kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

- 2) BUMDes Maju Mandiri walaupun belum begitu lama terbentuk namun berkontribusi dalam transformasi konflik di Goa Pindul. Adapun upaya yang dilakukannya adalah selalu menjaga komunikasi yang baik dengan para operator di Goa Pindul dan segera menyelesaikan permasalahan yang muncul.
- 3) Upaya yang dilakukan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah dengan selalu membangun komunikasi kepada pihak-pihak yang berseteru. Disamping itu, melakukan evaluasi dan monitoring (pengawasan) terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan pengelolaan kepariwisataan di Goa Pindul.
- 4) Adapun upaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam transformasi konflik di Goa Pindul adalah dengan melakukan pendekatan personal kepada operator-operator di Goa Pindul agar dapat memahami keinginan dari masing-masing pihak yang berkonflik.
- 5) Partisipasi pihak Kepolisian dalam transformasi konflik di Goa adalah melakukan pengawasan keamanan di area Goa Pindul melalui Bhabinkamtibmas Polsek Karangmojo.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Kondisi Relasional Antara Kelompok Sadar Wisata di Goa Pindul Pasca Penyelesaian Konflik

Dari hasil penelitian terkait dengan kondisi relasional antara Pokdarwis pasca penyelesaian konflik diperoleh temuan bahwa terdapat 9 pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan pada tanggal 24 September 2016 di Polres Gunungkidul yaitu Pokdarwis Dewa Bejo, Mriwis Putih, Gelaran Indah, SBM, Ngancar Wisata, Sadam Wisata, Karya Wisata, Goa Mas Adventure, dan Dewi Taliman sedangkan untuk saat ini Pokdarwis yang aktif beroperasi berjumlah 11 Pokdarwis. Pokdarwis Sadam Wisata sudah tidak beroperasi dan Goa Mas Adventure berganti nama menjadi Tiga Tugu Abadi. Secara tidak resmi dari 11

Pokdarwis tersebut terbagi ke dalam 2 kubu yang berbeda atau saling bertentangan yaitu kelompok perintis dan kelompok bukan perintis.

Galtung menyebutkan bahwa konflik adalah konsep triadik A + B + C yang saling berhubungan yang digambarkan melalui sebuah segitiga, dimana A adalah *attitude* (sikap), B adalah *behaviour* (perilaku) dan C adalah *contradiction* (kontradiksi). Jika dalam suatu konflik sudah terdapat ketiga komponen tersebut maka menunjukkan adanya konflik terbuka karena pada komponen B menunjukkan adanya kekerasan langsung (*direct violence*), sedangkan jika konflik berada pada komponen A dan B merupakan konflik laten ataupun konflik yang tidak muncul ke permukaan namun hal tersebut menunjukkan adanya kekerasan budaya (*cultural violence*) dan kekerasan struktural (*struktural violence*).

Dalam konflik di Goa Pindul maka dapat di lihat bahwa sejak pertama kali di bukanya Goa Pindul sebagai tempat wisata pada tahun 2010 hingga adanya Nota Kesepakatan pada tahun 2016, terdapat beberapa kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan kepariwisataan di Gunungkidul diantaranya adalah Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Perbup Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Kedua peraturan tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan kepariwisataan di Goa Pindul.

Pada tahun 2010, pengelolaan Goa Pindul dilakukan oleh Pokdarwis Dewa Bejo. Pada tahun 2011, berdiri Pokdarwis Wira Wisata yang ikut membuka atau menyediakan jasa pelayanan pariwisata ke Goa Pindul. Pariwisata Goa Pindul semakin berkembang sehingga semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung, hal tersebut menimbulkan beberapa kelompok masyarakat untuk mendirikan Pokdarwis dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan taraf ekonomi. Dengan adanya beberapa Pokdarwis yang beroperasi di Goa Pindul

maka menimbulkan persaingan diantara sesama operator dan saling mengklaim hak terhadap pengelolaan Goa Pindul. Suasana semakin tidak terkendali ketika tersebar foto di dunia maya mengenai adanya kapasitas pengunjung yang berlebihan di Goa Pindul. Hal tersebut menjadi catatan negatif bagi pengelolaan Goa Pindul karena kapasitas pengunjung yang berlebihan berkaitan dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengunjung.

Beberapa kali telah dilakukan upaya dari pemerintah untuk memediasi perselisihan antara operator di Goa Pindul namun tidak memperoleh titik temu perdamaian. Hal tersebut membuat Kapolres Gunungkidul turun tangan untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh semua yang ada di Goa Pindul. Nota Kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 24 September 2016 di Polres Gunungkidul hanya bersifat sementara, Nota Kesepakatan tersebut tidak berlaku secara otomatis ketika BUMDes Bejiharjo terbentuk. Isi dari Nota Kesepakatan tersebut adalah mengenai kontribusi masuk destinasi wisata di Desa Bejiharjo dan kesepakatan membayar tarif kontribusi kepada Pokdarwis yang mengelola destinasi wisata tersebut. Dari Nota Kesepakatan tersebut maka setiap Pokdarwis yang ingin memasukkan wisatawan ke Goa Pindul maka harus membayar kontribusi kepada Pokdarwis Dewa Bejo sebesar Rp.10.000.

Tiga bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan, pemerintah Desa Bejiharjo segera membentuk BUMDes pada tanggal 16 Desember 2016 melalui Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2016. Dengan terbentuknya BUMDes maka terbentuk pula susunan kepengurusan BUMdes melalui Surat Keputusan Kepala Desa Bejiharjo Nomor 22/KPTS/2017 tentang Susunan Pengurus Bumdes Maju Mandiri, kemudian pada tanggal 21 Mei 2017 diresmikan oleh Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos di balai Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo. Adanya Nota Kesepakatan ternyata tidak dapat menyelesaikan konflik Goa Pindul secara tuntas, pada bulan Mei 2017 terdapat operator yang

melanggar Nota Kesepakatan yaitu dengan memasukkan wisatawan ke Goa Pindul tetapi tidak melalui Pokdarwis Dewa Bejo.

Pengelolaan Goa Pindul saat ini sudah diserahkan kepada BUMDes Maju Mandiri, namun dalam pelayanan kepada wisatawan bekerjasama dengan 11 operator yang ada di Bejiharjo. Hal tersebut dijelaskan oleh Sariyanto selaku Direktur BUMDes Maju Mandiri pada saat wawancara dengan peneliti pada tanggal 19 November 2018 di Kantor BUMDes Maju Mandiri:

...pengelolaan secara umum itu oleh BUMDes tetapi untuk pelayanan kepada wisatawan ke Goa Pindul kita bekerjasama dengan 11 operator. Jadi kita kerjasamanya dengan operatornya bukan dengan Pokdarwisnya. Operator itu adalah unit pelayanan di Pokdarwis, jadi kalau semisal ada permasalahan yang kita putus kerjasamanya itu bukan dengan Pokdarwisnya tetapi dengan operatornya atau CV nya... (wawancara pada tanggal 19 November 2018)

Hasil dari wawancara peneliti kepada operator-operator di Goa Pindul memiliki tanggapan yang berbeda terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tukiman (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018) mengatakan "Kalau satu Pokdarwis satu destinasi itu memang saya sangat setuju karena bayangkan saja kalau satu destinasi tetapi dikelola banyak pihak kan sangat mudah terjadi konflik". Tukidi (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018) mengatakan "Ya karena kita ga mau setiap saat konflik jadi mau ga mau ya kita setuju dengan kebijakan bahwa (Goa) Pindul dikelola BUMDes, tapi seharusnya BUMDes itu yang manut operator karena kan dia (BUMDes) datangnya belakangan sedangkan kita (operator) datang lebih dulu". Ramiyanto (wawancara 10 Oktober 2018) mengatakan "Saya kira kebijakan pemerintah daerah untuk Goa Pindul sekarang sudah dikelola BUMDes sudah bagus, pengelolaannya lebih tertata...".

Dari ketiga hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Tukiman menyetujui dengan kebijakan satu destinasi satu Pokdarwis

karena jika satu destinasi kelola oleh banyak pihak sangat rawan untuk terjadi konflik. Tukidi mengaku dengan terpaksa harus mengikuti segala aturan yang ada karena hal tersebut lebih baik daripada setiap saat terjadi konflik, dalam artian bahwa Tukidi dengan terpaksa menyetujui kebijakan Goa Pindul yang dikelola oleh BUMDes. Namun berbeda dengan Tukidi, Ramiyanto menyetujui kebijakan pemerintah desa jika Goa Pindul dikelola oleh BUMDes.

Hubungan antara Pokdarwis setelah adanya Nota Kesepakatan, peneliti mengamati bahwa adanya perbedaan pemahaman antara operator terkait dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Salah satunya adalah tentang implementasi Pasal 3 Ayat (2) Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menyebutkan bahwa “Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata”.

Parmin (bukan nama sebenarnya) selaku pengurus salah satu Pokdarwis di Bejiharjo saat diwawancarai peneliti pada tanggal 10 Oktober 2018 di kantor sekretariatnya mengatakan bahwa terkait dengan beberapa peraturan tentang kepariwisataan sudah dibahas berulang kali baik itu dengan Bupati Gunungkidul maupun dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Ia menambahkan jika kelompok bukan perintis sudah memiliki destinasi masing-masing, justru yang dipertanyakan itu adalah Pokdarwis Dewa Bejo karena terdapat empat Pokdarwis di dalam Dewa Bejo yaitu Dewa Bejo 1, Dewa Bejo 2, Dewa Bejo 3, dan Dewa Bejo 4. Kemudian yang menjadi pertanyaan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul adalah tentang ketentuan yang menyebutkan setiap satu destinasi wisata hanya dapat dibentuk satu kelompok sadar wisata. Ia berpendapat, untuk Goa Pindul sendiri merupakan destinasinya Dewa Bejo, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ketiga Pokdarwis dapat ikut memiliki destinasi wisata Goa

Pindul. Padahal peraturannya sudah jelas menyebutkan satu destinasi wisata hanya dapat dibentuk satu Pokdarwis.

Menurut Parmin, ketiga Pokdarwis di dalam Dewa Bejo itu sebenarnya tidak memiliki destinasi. Ia mengatakan, seharusnya ketiga Pokdarwis tersebut menaati peraturan yang ada, tidak boleh jika satu destinasi wisata di kelola oleh empat Pokdarwis, seharusnya Goa Pindul hanya destinasi wisatanya Dewa Bejo saja. Ia mengatakan bahwa ketika ia tidak memiliki destinasi selalu berbenturan dengan Dewa Bejo dan kelompoknya. Mereka protes karena misalnya dulu ketika Parmin tidak memiliki destinasi maka harus lewat Dewa Bejo yang memiliki destinasi Goa Pindul, baru kemudian ia di beri ijin untuk mengakses Goa Pindul. Parmin mengatakan jika destinasi wisatanya hanyalah desakan dari teman-teman sehingga tidak saya ia pasarkan karena tidak layak sebagai destinasi wisata.

...Tapi yang 6 Pokdarwis sampai saat ini masih itu mbak sering bertolak belakang dengan yang 3 pokdarwis. 6 Pokdarwis diluar Dewa Bejo itu kan sudah punya destinasi semua, justru yang 3 pokdarwis itu sering saya tanyakan kenapa kok ga punya destinasi. Memang sejak dihadapkan pada Perda, saya dan teman-teman itu protesnya disitu. Semua harus punya destinasi tetapi kenapa (Goa) Pindul kok dipakai 4 (Pokdarwis) itu. Mereka dalihnya dulu Pak Jarwo yang membuat kebijakan, bahwa ini dipakai 4 Pokdarwis itu padahal dari Dewa Bejo sendiri Mas Bagyo memang paling setuju kalau (Goa) Pindul itu cuma punya Dewa Bejo 1. Bahkan itu kan perintis dulu, lainnya istilahnya meri (iri) lah karena Goa itu kan milik alam, tidak merasa membikin. Maka setelah ada pengunjung banyak semua mengakui memiliki hak juga...

Ia menganggap bahwa pasal pada Perbup tersebut belum diterapkan sepenuhnya di Bejiharjo karena masih terdapat 3 Pokdarwis yang belum memiliki destinasi wisata tetapi masih diijinkan untuk berdiri. Hal tersebut tidak lepas kaitannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul yang menjadikan 4 Pokdarwis melebur menjadi satu (1) untuk memenuhi

ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Adapun Pokdarwis yang melebur menjadi satu adalah Pokdarwis Dewa Bejo, Pokdarwis Wira Wisata, Pokdarwis Panca Wisata dan Pokdarwis Tunas Wisata.

Adanya perbedaan pemahaman terlihat bahwa kelompok perintis menganggap mereka yang berhak untuk mengelola Goa Pindul karena mereka adalah kelompok sadar wisata yang berdiri di awal-awal pengembangan objek wisata Goa Pindul. Mereka yang merasakan asam pahitnya dalam merintis pengembangan Goa Pindul, mereka yang mengalami perjuangan pada saat berselisih dengan Atiek Damayanti. Kelompok perintis menganggap kelompok bukan perintis sebagai kelompok yang datang belakangan yang hanya tinggal menikmati hasil dari buah perjuangan kelompok perintis. Dengan adanya kebijakan dari BUMDes terkait dengan kerjasama operator di Goa Pindul bahwa semua operator dapat melayani jasa pramuwisata kepada wisatawan yang datang ke Goa Pindul tanpa harus melalui salah satu Pokdarwis, dengan catatan memberikan biaya masuk ke BUMDes sebesar Rp.5000/ wisatawan. Kelompok perintis menganggap bahwa masing-masing Pokdarwis memiliki destinasi wisata, seharusnya mereka mengembangkan destinasi wisata tersebut dan bekerjasama dengan Pokdarwis Dewa Bejo jika terdapat wisatawan yang ingin ke Goa Pindul. Jika mereka (kelompok bukan perintis) orientasi nya ke Goa Pindul maka seharusnya mereka tidak diijinkan untuk berdiri karena tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Sedangkan kelompok bukan perintis menganggap di dalam kelompok perintis hanya terdapat satu Pokdarwis yang memiliki destinasi pariwisata sedangkan Pokdarwis lainnya itu tidak memiliki destinasi wisata maka seharusnya mereka tidak diijinkan untuk beroperasi karena tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Kelompok bukan

perintis beranggapan bahwa semua pihak dapat mengakses Goa Pindul tanpa harus melalui perantara dari Pokdarwis lainnya karena sesama penduduk Desa Bejiharjo seharusnya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan keberadaan objek wisata Goa Pindul.

Parmin memahami bahwa masih terdapat pokdarwis yang belum memiliki destinasi wisata yaitu Pokdarwis Wira Wisata, Panca Wisata, dan Tunas Wisata. Sepemahaman dengan Parmin, Tukino beranggapan bahwa jika ketiga Pokdarwis tersebut melebur menjadi satu maka seharusnya satu manajemen, satu ketua, satu sekretariat. Tetapi pada kenyataan ketiga Pokdarwis tersebut memiliki sekretariat masing-masing dengan ketua, marketing, dan perijinan masing-masing. Namun berbeda dengan Paijo yang memberikan penjelasan bahwa Pokdarwisnya satu yaitu Dewa Bejo tetapi di dalam Pokdarwis tersebut terdapat 4 unit usaha yaitu unit usaha Dewa Bejo 1, unit usaha Dewa Bejo 2, unit usaha Dewa Bejo 3, dan unit usaha Dewa Bejo 4 karena jika tidak menggunakan nama Dewa Bejo maka tidak memiliki daerah tujuan wisata. Hal tersebut didukung hasil wawancara peneliti dengan Parjo pada tanggal 11 Oktober 2018 di kantor sekretariatnya "...Dewa Bejo itu ada satu mbak, jadi dibawahnya itu ada 4 yaitu Dewa Bejo 1, Dewa Bejo 2, Dewa Bejo 3, dan Dewa Bejo 4 itu namanya unit usaha...".

Dalam Segitiga ABC Galtung, komponen *attitude* mengacu pada pemahaman atau kesalahpahaman terhadap kelompok sendiri ataupun kelompok lawan. Pada konflik Goa Pindul, setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan menunjukkan bahwa belum adanya kesepakatan antara Pokdarwis atau operator sehingga mereka masih "saling serang" di suatu forum. Perbedaan pemahaman mereka juga terlihat dengan adanya BUMDes Maju Mandiri, terdapat pihak yang mendukung terbentuknya BUMDes namun di sisi lain terdapat pihak yang secara terpaksa menyetujui terbentuknya BUMDes. Kemudian pemahaman tentang ketentuan satu (1) destinasi wisata hanya dapat dibentuk satu (1) Pokdarwis masih menimbulkan pertentangan diantara Pokdarwis.

Pokdarwis di Goa Pindul yang kemudian terbagi kedalam dua kubu yang berbeda yaitu kelompok perintis dan kelompok bukan perintis. Kelompok bukan perintis menganggap bahwa di dalam kelompok perintis terdapat tiga Pokdarwis yang belum memiliki DTW atau destinasi wisata sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, mereka beranggapan bahwa kelompok yang tidak menaati ketentuan yang ada seharusnya tidak di iijinkan untuk beroperasi ataupun melayani wisatawan. Sedangkan Kelompok Perintis yang terdiri dari 4 Pokdarwis menganggap bahwa mereka adalah Pokdarwis Dewa Bejo dan memiliki destinasi wisata yaitu Goa Pindul secara legal melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Komponen *contradiction* merupakan kondisi mendasar ketika adanya ketidaksesuaian dari tujuan masing-masing pihak, adanya sesuatu yang menghalangi sesuatu lain untuk mencapai tujuan. Pada konflik Goa Pindul menunjukkan adanya indikasi yang mengarah pada kontradiksi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keinginan dari Pokdarwis agar Pokdarwis lainnya tidak beroperasi dapat dilihat dari saling serang pendapat terkait dengan pengelolaan Goa Pindul, ketentuan satu (1) destinasi wisata hanya dapat dibentuk satu (1) Pokdarwis, dan sertifikasi pemandu.

Dalam pengelolaan Goa Pindul kelompok perintis berpendapat bahwa adanya kekeliruan yang dilakukan oleh kelompok bukan perintis, dalam artian bahwa setiap Pokdarwis yang ada di Desa Bejiharjo sudah memiliki destinasi wisata masing-masing tetapi mengapa kelompok bukan perintis tidak bersedia bekerjasama dengan kelompok perintis dalam melayani wisatawan ke Goa Pindul karena kelompok perintis adalah Pokdarwis yang legal untuk mengelola Goa Pindul berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar

Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Kelompok bukan perintis memiliki kewajiban untuk mengembangkan destinasi wisata milik mereka masing-masing, sehingga tidak semua Pokdarwis tertuju pada wisata Goa Pindul. Jika kelompok bukan perintis tidak dapat memenuhi kewajiban maka pihak yang memberi ijin operasional dalam hal ini adalah pemerintah seharusnya mencabut ijin tersebut. Oleh karena itu setelah ditandatangani Nota Kesepakatan, peneliti mengamati adanya sikap yang mengarah pada kontradiksi. Seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa dari hasil wawancara peneliti dengan 10 Pokdarwis di Bejiharjo, mereka terbagi kedalam dua kubu yang berbeda yaitu kelompok perintis dan kelompok bukan perintis. Dalam forum rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah mereka seringkali mencari kesalahan-kesalahan lawan, tujuan mereka saling serang pendapat adalah agar Pokdarwis lawan tidak lagi beroperasi karena dengan berkurangnya Pokdarwis maka akan berkurang pula pesaing dalam mendapatkan wisatawan.

Komponen *behaviour* adalah bagaimana pihak-pihak yang berkonflik mengekspresikan gerakan mereka, baik berupa keakraban ataupun permusuhan. Menurut Galtung pada tahapan *behaviour* dapat berupa kekerasan langsung, namun dalam konflik Goa Pindul belum muncul tindakan negatif yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling bertentangan. Walaupun perselisihan sudah pada tahapan *attitude* dan *contradiction*, namun hal tersebut belum sampai pada tahapan *behaviour* sehingga kekerasan yang terjadi masih bersifat *invisible* atau konflik laten. Permasalahan tersebut harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang terbuka.

Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan di atas maka konflik Goa Pindul berdasarkan Segitiga Galtung adalah sebatas pada *attitude* karena terdapat pemahaman yang berbeda antara Pokdarwis, Parmin dan Tukino baru sekedar melakukan protes dengan menyampaikan pendapat dan argumennya di forum rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah. Dari *attitude* tersebut kemudian bergerak ke arah *contradiction* karena terdapat kelompok yang menginginkan kelompok lain agar berhenti beroperasi, namun hal tersebut tidak sampai pada *behaviour* karena sampai ketika penelitian ini dilakukan mereka tidak melakukan hal yang bersifat *direct violence*.

Menurut Ichsan Malik, sumber-sumber konflik sosial di Indonesia ada lima, yaitu konflik struktural, konflik kepentingan, konflik nilai, konflik hubungan sosial psikologis, dan konflik data. Dalam menganalisis sumber konflik di Goa Pindul pasca penandatanganan Nota Kesepakatan, terdapat beberapa hal yang mengarah pada konflik kepentingan.

Dari hasil penelitian, jika dianalisis menggunakan sumber-sumber konflik sosial di Indonesia menurut Ichsan Malik maka dapat diperoleh hasil bahwa sumber konflik di Goa Pindul adalah kepentingan. Antar Pokdarwis memiliki kepentingan masing-masing dalam menyediakan jasa pramuwisata ke Goa Pindul. Dimana masing-masing Pokdarwis ingin memberdayakan masyarakat sekitar, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada intinya adalah mereka dalam mendirikan sebuah kelompok masyarakat harus bisa memastikan kelompok tersebut tetap hidup. Sebuah kelompok dapat tetap hidup dengan adanya aktifitas perekonomian. Aktifitas perekonomian yang paling penting dalam hal ini adalah adanya pemasukan keuangan. Salah satunya sumber pemasukan keuangan Pokdarwis adalah wisatawan, sedangkan destinasi wisata di Bejiharjo yang dapat banyak menarik wisatawan adalah Goa Pindul. Para wisatawan datang ke Bejiharjo tujuannya adalah untuk mengunjungi Goa Pindul, sehingga semua Pokdarwis memiliki kepentingan di Goa Pindul. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan mereka dalam mempertahankan Pokdarwis adalah untuk mendapatkan wisatawan. Untuk mencapai tujuan mereka, peneliti mengamati terdapat indikasi persaingan yang tidak sehat antar Pokdarwis yaitu:

- 1) Adanya permainan tarif masuk ke Goa Pindul yang menyebabkan perang harga antara Pokdarwis.
- 2) Merebaknya biro perjalanan ilegal ke Goa Pindul atau yang lebih dikenal dengan Joki.
- 3) Adanya keinginan dari Pokdarwis agar Pokdarwis lainnya tutup atau tidak beroperasi.

Adanya kecurigaan peneliti terkait permainan tarif di Goa Pindul adalah berawal dari pernyataan Yudhi (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018) yang mengatakan "...sekarang itu terjadi konflik yang luar biasa di intern, sekarang itu terjadi perang harga yang tidak terkontrol. Harga yang diputuskan oleh pemerintah daerah adalah Rp. 40.000, tetapi apa yang terjadi silahkan tanya, silahkan selidiki mereka (para Pokdarwis) itu menjual berapa...". Sama halnya dengan Sukijat (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018) yang mengatakan "...andai kata di sini jual Rp.35.000 (operator) yang lain belum tentu, jadi lain operator sudah lain harga...".

Sutiman (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2018) memberikan alasan mengapa muncul permainan harga di Goa Pindul, ia mengatakan "...karena terlalu banyak Pokdarwis jadi masalah harga kita masih bersaing. Ada yang jual rendah ada yang sedang bahkan ada yang sekedar menjual. Harga ditetapkan BUMDes Rp.40.000 untuk Goa Pindul...". Permainan tarif muncul karena banyaknya operator yang melayani jasa pelayanan wisatawan ke Goa Pindul, operator sendiri adalah kelompok usaha yang ada di dalam Pokdarwis. Jumlah Pokdarwis di Bejiharjo berjumlah 11 dan semuanya terfokus pada Goa Pindul sehingga timbul persaingan dalam mendapatkan wisatawan. Dalam memperoleh wisatawan, para Pokdarwis tersebut di bantu oleh biro perjalanan. Adapun biro perjalanan yang banyak beredar di Goa Pindul adalah biro perjalanan yang ilegal atau lebih dikenal dengan sebutan Joki. Joki mengambil keuntungan dari wisatawan yang datang, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya mereka menawarkan

wisatawan kepada para Pokdarwis. Dari hasil penawaran tersebut kemudian Joki mengantarkan wisatawan ke sekretariat Pokdarwis yang memberikan tarif terendah. Dalam hal ini Joki memberikan tarif berbeda kepada wisatawan dari tarif yang diberikan oleh Pokdarwis.

Contoh kasusnya adalah seperti ini: dari pihak Pokdarwis memberikan harga Rp.20.000/orang kepada Joki, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Joki memberikan harga Rp.50.000/orang kepada wisatawan sedangkan kebijakan tarif masuk ke Goa Pindul dari BUMDes adalah Rp.40.000. BUMDes sendiri memungut biaya Rp.5000 kepada para Pokdarwis untuk setiap wisatawan Goa Pindul yang datang melalui Pokdarwis. Tarif Rp.20.000/orang yang diterima Pokdarwis dari Joki itulah yang kemudian dikelola untuk keuangan Pokdarwis. Setelah memberikan biaya kepada BUMDes sisanya adalah untuk membayar *fee* kepada pemandu, biaya sewa ban atau perawatan ban, dan pengeluaran lainnya dari Pokdarwis baik itu yang bersifat harian ataupun bulanan. Dengan adanya permainan harga tersebut yang terjadi adalah wisatawan banyak yang datang tetapi tingkat kesejahteraan di Pokdarwis rendah.

Peneliti memiliki kesempatan untuk berbicara kepada wisatawan yang berkunjung ke Goa Pindul. Pertama adalah wisatawan yang berasal dari Sukoharjo mengatakan bahwa tiket masuk Goa Pindul Rp.60.000/orang, kemudian Hendro berasal dari Wonogiri mengatakan bahwa tiket masuk Goa Pindul Rp.50.000/ orang, lalu Ngatiman berasal dari Sukoharjo mengatakan tiket masuk Goa Pindul adalah Rp.50.000/ orang, dan yang terakhir adalah wisatawan dari Tangerang yang mengatakan tidak tahu berapa tiket masuk Goa Pindul karena dikoordinir oleh ketua rombongannya.

Sebenarnya masing-masing Pokdarwis di Bejiharjo sudah memiliki destinasi wisata atau Daerah Tujuan Wisata (DTW) tetapi orientasi dan fokus mereka adalah ke pelayanan Goa Pindul sehingga seolah-olah mengabaikan untuk mengembangkan DTW nya masing-masing, hal ini

menjadi “PR” bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul untuk mendorong dan membantu para Pokdarwis dalam mengembangkan destinasi wisata di Bejiharjo.

Pokdarwis dalam memasarkan Goa Pindul selain melalui *website* dan media sosial juga menggunakan jasa biro perjalanan. Biro perjalanan lebih dikenal dengan sebutan Joki karena mereka ilegal. Joki adalah orang-orang yang yang mengantarkan wisatawan ke Goa Pindul dengan dalih menunjukkan jalan, mereka akan *nongkrong* di tempat-tempat tertentu yang banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan wisatawan. Asal mula timbulnya Joki dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Eli selaku Kepala Bidang Industri dan Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 1 November 2018 di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, ia mengatakan:

...orang ketika akan ke pindul kan waktu dulu kan ga google map seperti sekarang. Kemudian orang cenderung bertanya, misalnya di pertigaan Wonosari di bundaran itu kan banyak (wisatawan) yang tanya, pak Pindul dimana? nah mungkin dari situ ada proses tukang ojeknya terus nawari atau memang diminta bantuan, pak *mbok* tolong saya di antar nanti tak kasih (biaya) transport. Nah ketika sampai disana kan waktu dengan Dewa Bejo tidak dapat apa-apa, pembelaannya toh kamu (tukang ojek dll) yang berinisiasi mengantar kalau kamu ngantar wisatawan ya minta saja sama wisatawannya. Nah ketika muncul dua kelompok sudah mulai ada persaingan. Persaingan dan istilahnya joki yang ada di jalan itu kan kemudian ketika mengantar ke Dewa Bejo, pak *mbok* saya di kasih *fee* untuk tamu yg saya antar. Kemudian kelompok semakin bertambah dan berkembang, nah kelompok-kelompok ini kan bersaing untuk mendapatkan wisatawan akhirnya mereka juga bersaing dalam memberikan yang namanya *fee* itu...

Joki bermula ketika wisata susur Goa Pindul mulai booming sedangkan petunjuk arah sangat terbatas dan aplikasi google map belum secanggih saat ini sehingga banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Goa Pindul mengalami kebingungan arah. Satu-satunya solusi yang dapat dilakukan adalah bertanya seseorang yang ditemuinya di jalan pada titik keramaian, semisal pada pangkalan ojek. Terkadang seseorang yang ditemui di jalan di mintai tolong untuk sekaligus mengantar hingga tempat

tujuan. Sebagai imbalannya, wisatawan memberikan *fee* kepada pengantar. Hal tersebut terus berkembang, namun si pengantar (joki) kemudian meminta *fee* kepada Pokdarwis sebagai imbalan karena telah mendatangkan tamu ke sekretariat tersebut. Joki masih banyak bermunculan karena belum adanya ketegasan dari pemerintah daerah maupun pemerintah setempat dalam menertibkan Joki sehingga mereka masih dengan bebas beroperasi.

Telah disinggung pada paragraf sebelumnya bahwa dari 11 Pokdarwis yang beroperasi di Goa Pindul, mereka terbagi ke dalam dua kubu yang berbeda yaitu Kelompok Perintis dan Kelompok Bukan Perintis. Kelompok perintis adalah 4 Pokdarwis yang terbentuk sebelum tahun 2014 yang kemudian melebur menjadi satu melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mereka merupakan kelompok yang kurang menyetujui adanya BUMDes Maju Mandiri. Peneliti menyimpulkan bahwa mereka kurang menyetujui adanya BUMDes karena dengan adanya BUMDes Nota Kesepakatan secara otomatis tidak berlaku dan mereka kehilangan penghasilan Rp.10.000/ orang dari wisatawan yang berkunjung ke Goa Pindul.

Kelompok bukan perintis adalah 7 Pokdarwis di luar Dewa Bejo, mereka adalah pihak-pihak yang mendorong dan berinisiatif untuk mendirikan sebuah badan usaha milik desa di desa bejiharjo. Peneliti menyimpulkan bahwa mereka sangat menyetujui adanya BUMDes karena mereka tidak mau memberikan biaya Rp.10.000/orang kepada Dewa Bejo dari setiap wisatawan yang datang sedangkan ketika BUMDes terbentuk mereka hanya membayar biaya Rp.5.000/orang dari setiap wisatawan yang datang.

Dalam situasi konflik, adanya perjanjian damai merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian konflik, sehingga situasi konflik

bertransformasi menjadi damai. Galtung menyebutkan bahwa terdapat dua jenis kondisi damai yaitu *positive peace* dan *negative peace*. *Positive peace* adalah terciptanya kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan *negative peace* adalah kondisi dimana tidak adanya perang, tidak adanya konflik, dan tidak adanya kekerasan namun realitas masyarakat mengalami kekerasan yang tidak tampak seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, ketidakpuasan dan perselisihan pribadi. Dalam penelitian ini indikator kondisi damai yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator *positive peace* dan *negative peace*

Positive Peace	Negative Peace
1. Adanya keadilan	1. Tidak adanya keadilan
2. Adanya kesetaraan	2. Tidak adanya kesetaraan
3. Adanya kepuasan	3. Tidak adanya kepuasan
4. Tidak adanya perselisihan pribadi	4. Adanya perselisihan pribadi

Sumber: Olahan peneliti, 2018.

Pada konflik di Goa Pindul, terdapat Nota Kesepakatan sebagai perjanjian damai diantara pihak-pihak yang berkonflik. Wilayah Bejiharjo khususnya di Goa Pindul akan dikatakan damai yang positif jika memenuhi 4 indikator yang disebutkan pada Tabel 4.5 Indikator *Positive Peace* dan *Negative Peace*, tetapi jika masih terdapat indikator yang tidak terpenuhi maka wilayah tersebut merupakan kondisi damai yang negatif. Dari hasil wawancara dengan 10 Pokdarwis dan observasi peneliti di lapangan. Dengan dikelolanya Goa Pindul oleh BUMDes maka semua Pokdarwis dapat mengakses langsung ke Goa Pindul melalui operatornya. Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang menyebutkan satu (1) destinasi wisata hanya dapat di bentuk satu (1) Pokdarwis, 10 Pokdarwis sangat menyetujui dan mengatakan bahwa hal tersebut sudah adil bagi 11 Pokdarwis yang ada di Bejiharjo. Namun hal berbeda dengan kebijakan pemerintah yang menunjuk BUMDes sebagai pengelola Goa Pindul

terdapat beberapa pihak yang merasa keberatan karena kebijakan dari BUMDes 11 operator dapat memasukkan wisatawan ke Goa Pindul tanpa harus melewati perantara Pokdarwis lain. Seperti yang disampaikan Tukidi pada saat wawancara dengan peneliti, ia mengatakan:

...yang tadinya Goa Pindul itu yang bisa memasukkan wisatawan hanya 4 kelompok tetapi sekarang sudah bebas, jadi 11 operator bisa memasukkan semua. Sekarang mereka bisa masuk sendiri-sendiri klaw dulu kan lewat kerjasama dengan 4 kelompok. Jadi karena ada aturan dari BUMDes itu maka sudah di rusak semua... (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2018)

Namun untuk pengelolaan Goa Pindul, peneliti mengamati adanya kesetaraan antara operator karena mereka memiliki peluang yang sama untuk melayani wisatawan. Mereka dapat mengakses Goa Pindul tanpa harus melewati pihak manapun.

Mengenai kepuasan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan Goa Pindul terdapat dua pendapat yang berbeda. Kubu perintis mengatakan bahwa mereka tidak merasa puas dengan pengelolaan Goa Pindul yang dilimpahkan kepada BUMDes, sedangkan kubu bukan perintis sangat mendukung keberadaan BUMDes.

Oleh karena itu berdasarkan teori damai Galtung maka kondisi antar operator di Goa Pindul adalah kondisi damai yang negatif karena masih terdapat perselisihan pribadi antar operator. Namun hal tersebut hanya pada lingkup *attitude* dan *contradiction* sehingga adanya kekerasan yang bersifat *invisible*.

4.3.2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Transformasi Konflik di Goa Pindul

Dari hasil penelitian terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul diperoleh temuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Bejiharjo setelah penandatanganan Nota Kesepakatan di Polres Gunungkidul segera mengambil langkah cepat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Selain itu, pemerintah Desa Bejiharjo melakukan dialog-dialog kepada pihak-

pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

- 2) BUMDes Maju Mandiri walaupun belum begitu lama terbentuk namun berkontribusi dalam transformasi konflik di Goa Pindul. Adapun upaya yang dilakukannya adalah selalu menjaga komunikasi yang baik dengan para operator di Goa Pindul dan segera menyelesaikan permasalahan yang muncul.
- 3) Upaya yang dilakukan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah dengan selalu membangun komunikasi kepada pihak-pihak yang berseteru. Disamping itu, melakukan evaluasi dan monitoring (pengawasan) terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan pengelolaan kepariwisataan di Goa Pindul.
- 4) Adapun upaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam transformasi konflik di Goa Pindul adalah dengan melakukan pendekatan personal kepada operator-operator di Goa Pindul agar dapat memahami keinginan dari masing-masing pihak yang berkonflik.
- 5) Partisipasi pihak Kepolisian dalam transformasi konflik di Goa adalah melakukan pengawasan keamanan di area Goa Pindul melalui Bhabinkamtibmas Polsek Karangmojo

Sebelum membahas upaya transformasi konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah maka perlu menganalisis transformasi konflik di Goa Pindul. Miall mengembangkan transformasi konflik menjadi lima aspek yaitu transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi persoalan, dan transformasi kelompok dan personal.⁸⁴

Transformasi konteks melekatkan konflik dalam konteks sosial, regional atau internasional. Terkadang dampak dari perubahan konteks lebih dramatisir daripada perubahan aktor konflik. Dalam konflik di Goa Pindul, peneliti melihat adanya perubahan konteks setelah dikeluarkannya

⁸⁴ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik...*, hlm 250-252.

Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Perda tersebut mengatur beberapa hal terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.⁸⁵ Konflik di Goa Pindul terjadi ketika muncul Pokdarwis kedua yaitu Pokdarwis Wira Wisata. Konflik semakin mengalami eskalasi ketika bermunculan Pokdarwis-Pokdarwis baru lainnya, hal tersebut memperburuk manajemen kepariwisataan di Goa Pindul dimana satu destinasi pariwisata di kelola beberapa kelompok masyarakat. Hingga tahun 2013 setidaknya terdapat empat Pokdarwis yang mengelola Goa Pindul yaitu Pokdarwis Dewa bejo, Pokdarwis Wira Wisata, Pokdarwis Panca Wisata dan Pokdarwis Tunas Wisata namun tanpa adanya koordinasi yang jelas diantara keempat Pokdarwis tersebut.

Kehadiran Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi di Goa Pindul dengan mengatur mengatur manajemen kepariwisataannya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan “Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata”, kemudian Jarwo selaku Kepala Dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang menjabat pada waktu itu menyarankan kepada empat Pokdarwis yang mengelola Goa Pindul untuk bergabung menjadi satu. Hal tersebut bertujuan untuk menepati ketentuan di dalam Perbup sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Saran tersebut disetujui oleh keempat pihak yang kemudian disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata

⁸⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 5, ayat (1).

Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Maka sejak saat itu terdapat empat Pokdarwis yang tergabung dalam Pokdarwis Dewa Bejo yaitu Dewa Bejo 1, Dewa Bejo 2 (Wira Wisata), Dewa Bejo 3 (Panca Wisata), dan Dewa Bejo 4 (Tunas Wisata).

Setelah dikeluarkannya peraturan terkait kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mendirikan Pokdarwis di Desa Bejiharjo. Beberapa Pokdarwis yang muncul setelah adanya Perda dan Perbup adalah Pokdarwis Karya Wisata, Pokdarwis Dewi Taliman, Pokdarwis Gelaran Indah, Pokdarwis Mriwis Putih, Pokdarwis SBM, Pokdarwis Ngancar Wisata, dan Pokdarwis Tiga Tugu Abadi.

Setelah adanya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul terdapat perubahan konteks di konflik Goa Pindul yang semula perselisihan terjadi dalam lingkup kelompok Dewa bejo kemudian menjadi konflik antara kelompok Dewa Bejo dengan kelompok di luar Dewa Bejo, dimana pada awalnya yang terlibat konflik adalah 4 kelompok kemudian menjadi 11 kelompok. Dari sisi kewilayahan, pada awalnya konflik terjadi diantara Pokdarwis yang ada di sekitar Goa Pindul namun kemudian berkembang menjadi Pokdarwis yang ada di Desa Bejiharjo.

Transformasi struktural mengacu kepada perubahan yang terjadi dalam pola hubungan antara kedua belah pihak yang bertikai, dimana terdapat pihak yang lebih dominan dan pihak yang lemah. Dalam konflik di Goa Pindul, setelah adanya Nota Kesepakatan ternyata tidak menjamin terciptanya damai di Goa Pindul dapat dilihat dari adanya pihak yang melanggar Nota Kesepakatan yang sudah disetujui oleh para operator di Goa Pindul. Nota Kesepakatan semakin memperkuat posisi Kelompok

Perintis karena dalam pengelolaan Goa Pindul Pokdarwis di luar kelompok perintis diwajibkan untuk memberikan biaya Rp.10.000/wisatawan kepada kelompok perintis. Pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan kedua belah kubu menyetujui karena untuk pemandu dan peralatan dilayani dan disediakan oleh kelompok perintis, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Untuk pemandu dan peralatan tetap ditanggung oleh masing-masing Pokdarwis, hal tersebut menimbulkan gejolak diantara kedua belah kubu. Penyebabnya adalah pengeluaran di pihak kelompok bukan perintis tetap banyak tetapi pemasukan berkurang karena terpotong Rp.10.000/wisatawan yang harus dibayarkan kepada kelompok perintis yang dalam hal ini adalah Dewa Bejo.

Untuk menyelesaikan konflik maka perlu adanya perubahan struktur yang dapat menyeimbangkan kekuatan diantara kedua belah kubu. Hal tersebut dapat terjadi jika adanya dukungan dari pihak ketiga terhadap pihak yang lebih lemah. Adapun yang menjadi pihak ketiga di konflik Goa Pindul adalah pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah tingkat desa. Pada konflik Goa Pindul, peneliti melihat bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung untuk perlu adanya transformasi struktural di Goa Pindul, hal tersebut berdasarkan pada hasil wawancara dengan Azman Latif, ia mengatakan:

...itu (Goa Pindul) kan bukan sesuatu yang di buat, bukan sesuatu yang perlu modal besar, yang seakan-akan harus memberikan modal, *wong* itu kan sudah alami seperti itu, sebetulnya ini yang harus kita sadarkan, jadi bukan kemudian seperti orang pemilik modal atau seperti pemilik saham, karena saya ikut sebagai pendiri kan gitu, saya tanam itu sebagai perusahaan yang paling kuat kan mendirikan perusahaan yang mendirikan saham, ini sahamnya dia sebetulnya tidak seperti itu yang selama ini kan itu di anggap sebagai sebuah upaya perusahaan gitu, kan ini adalah alam dari, sudah alamnya dari Tuhan sudah seperti itu... (Wawancara pada tanggal 5 November 2018)

Pemerintah Desa bejiharjo di dukung oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendirikan BUMDes. Dengan adanya BUMDes, pengelolaan

Goa Pindul di kelola oleh BUMDes bekerjasama dengan 11 operator yang ada pada Pokdarwis di Desa Bejiharjo. Oleh karena itu 11 Pokdarwis yang ada di Desa Bejiharjo memiliki kesetaraan dalam mengakses Goa Pindul.

Perubahan struktur konflik di Goa Pindul terjadi karena 2 faktor. Pertama, adanya keterlibatan aparat keamanan yaitu AKBP Nugrah Trihadi sebagai mediator kedua belah kubu yang berkonflik sehingga dapat tercapai penandatanganan Nota Kesepakatan. Tipe masyarakat Desa Bejiharjo yang tradisional sehingga memiliki sikap segan terhadap anggota Polri. Kedua, adanya peran dari pemerintah desa yang melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan terhadap kedua belah kubu yang berkonflik sehingga pada akhirnya kebijakan pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes dapat diterima kedua belah kubu.

Transformasi aktor meliputi kebijakan yang di buat untuk mengubah tujuan sebagai upaya untuk menginisiasi perdamaian. Hal tersebut juga mencakup perubahan kepemimpinan, perubahan nilai atau keyakinan, keputusan aktor yang berkonflik untuk menentukan kembali arah mereka, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai dan merubah perspektif secara radikal. Dalam konflik di Goa Pindul, transformasi aktor dapat di lihat setelah dikeluarkannya Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang kemudian melalui Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa "Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata". Melalui ketentuan tersebut, empat Pokdarwis yang awalnya saling berselisih kemudian bersedia untuk tergabung dalam satu Pokdarwis Dewa Bejo dengan nama Pokdarwis Dewa Bejo 1, Dewa Bejo 2, Dewa Bejo 3, dan Dewa Bejo 4.

Perubahan terjadi dari yang semula empat kekuatan terpisah dalam masing-masing kelompok dan mereka saling berselisih kemudian empat kelompok tersebut menyatu menjadi satu kelompok dan berdamai dalam mengelola Goa Pindul. Adapun yang menyebabkan mereka bersedia

untuk bergabung dalam satu Pokdarwis Dewa Bejo adalah dorongan dari pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu Dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang mampu mempengaruhi cara berfikir mereka bahwa suatu peraturan itu harus dilaksanakan jika tidak ingin menimbulkan masalah baru bagi mereka.

Dampak dari keputusan tersebut adalah timbulnya identitas baru yaitu Kelompok Perintis di Goa Pindul, hal tersebut menjadikan perubahan aktor konflik dari konflik antar Pokdarwis menjadi konflik antara Kelompok Perintis dan Kelompok Bukan Perintis. Adanya penggabungan empat Pokdarwis memberikan kekuatan tersendiri bagi Kelompok Perintis karena mereka memiliki legalitas atas destinasi wisata Goa Pindul melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Transformasi persoalan dapat muncul jika ada masalah baru yang diperselisihkan antara kedua belah pihak yang berkonflik.⁸⁶ Dalam konflik Goa Pindul, adanya BUMDes maju mandiri mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan perebutan hak dalam pengelolaan Goa Pindul. Permasalahan selesai ketika ada kebijakan bahwa Goa Pindul di kelola oleh BUMDes dan semua operator memiliki hak yang sama dalam mengakses wisatawan ke Goa Pindul. Namun permasalahan yang ada saat ini adalah terkait dengan biro perjalanan ilegal atau yang lebih di kenal dengan sebutan Joki, perang harga yang mengindikasikan persaingan yang tidak sehat, dan sertifikasi pemandu.

Joki banyak digunakan oleh para Pokdarwis di Goa Pindul untuk dapat mengarahkan wisatawan dengan menggunakan jasa pelayanan wisata dari Pokdarwis tersebut. Beberapa Pokdarwis mengatakan bahwa Joki merupakan salah satu cara marketing mereka untuk dapat mendatangkan wisatawan. Penggunaan jasa Joki cukup membantu untuk

⁸⁶ Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh...*, hlm 110.

mendatangkan wisatawan. Namun terkait dengan harga tiket masuk wisatawan Goa Pindul, Joki dapat menentukan sendiri harga tiket masuk di luar ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh BUMDes yaitu senilai Rp.40.000/wisatawan karena Joki dapat dengan leluasa mencari keuntungan yang sebesar-besarnya terhadap wisatawan yang mereka antar ke Goa Pindul.

Perang harga yang terjadi di Goa Pindul tidak lepas hubungannya dengan peran Joki. Ketika Joki memiliki atau membawa wisatawan maka ia akan menghubungi semua operator yang ada di Goa Pindul untuk kesepakatan harga yang diberikan Joki kepada operator. Operator yang berani memberikan harga paling murah maka Joki akan membawa wisatawannya ke sekretariat Pokdarwis tersebut. Sedangkan masing-masing Pokdarwis memiliki perbedaan terkait dengan fasilitas yang dimiliki seperti pelampung, ban, dan jarak dari sekretariat ke Goa Pindul. Beberapa hal tersebut berpengaruh pada pengeluaran kelompok, seperti biaya untuk sewa ban, biaya akomodasi perjalanan dari sekretariat menuju Goa Pindul. Jadi dalam memberikan kesepakatan harga kepada Joki, operator juga mempertimbangkan pengeluaran kelompok maka tidak semua Pokdarwis berani memberikan harga murah kepada Joki. Pokdarwis yang tidak berani memberikan harga murah secara otomatis mereka kurang diminati oleh Joki selaku yang membawa wisatawan, sehingga beberapa diantara Pokdarwis mengeluh kurangnya pemasukan karena sepi pengunjung.

Sertifikasi pemandu kerap kali disuarakan oleh salah satu pihak di Goa Pindul karena tidak semua operator dalam Pokdarwis memiliki pemandu yang bersertifikat. Pemandu yang bersertifikat memang menjadi salah satu indikator atau kriteria pelayanan baik yang diberikan oleh operator. Terdapat salah satu pihak yang selalu menyuarakan agar semua operator memiliki pemandu yang bersertifikat, jika tidak dapat menyanggupi maka diharapkan Pokdarwis yang tidak memiliki pemandu bersertifikat untuk berhenti beroperasi. Hal tersebut berhubungan

dengan kontradiksi di Goa Pindul (dapat di lihat kembali pada pembahasan 4.3.1).

Hadirnya BUMDes Maju Mandiri membuat adanya transformasi masalah. Pada awalnya konflik Goa Pindul terkait dengan perebutan hak dalam pengelolaan Goa Pindul, kemudian menjadi permasalahan Joki, perang harga, dan sertifikasi pemandu. Hal tersebut terjadi karena belum adanya ketegasan dalam menertibkan para Joki terutama joki-joki di pinggir jalan, sulitnya mengontrol penjualan tiket masuk Goa Pindul di setiap sekretariat Pokdarwis, dan kurangnya fasilitas dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan terkait dengan kepemanduan.

Transformasi kelompok dan personal adalah perubahan sikap yang ditunjukkan oleh perorangan, kelompok ataupun pemerintah terhadap upaya resolusi konflik. Dalam konflik Goa Pindul yang dapat peneliti amati berdasarkan wawancara dengan 10 ketua Pokdarwis, adanya perubahan ekspresi, gestur tubuh, mimik wajah, dan intonasi bicara yang berbeda pada pembahasan-pembahasan tertentu. Ekspresi mereka berapi-api dengan penuh semangat menjawab pertanyaan penelitian, intonasi bicara meninggi, dan sesekali memukulkan tangan di meja ketika obrolan tentang pihak lawan. Selain itu, keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul memberikan dampak terhadap perubahan perspektif Pokdarwis Dewa Bejo, Wira Wisata, Panca Wisata, dan Tunas Wisata. Mereka yang semula terpisah dalam masing-masing kelompok yang saling berselisih kemudian tergabung ke dalam kelompok yang lebih besar dan menjadi sekutu, mereka yang semula saling bermusuhan kemudian menjadi lebih kooperatif. Sikap kooperatif dari mereka menunjukkan adanya transformasi kelompok pada konflik Goa Pindul.

Lederach menggambarkan konsep transformasi konflik ke dalam tiga tahapan penyelidikan. Penyelidikan pertama menggambarkan situasi

yang sedang terjadi, penyelidikan kedua menganalisis upaya pemerintah untuk menciptakan *positive peace*, pada penyelidikan ketiga diperoleh empat dimensi perubahan setelah terjadinya konflik yaitu dimensi personal, dimensi relasional, dimensi struktural, dan dimensi budaya. Dalam konflik Goa Pindul, penyelidikan pertama diperoleh bahwa kondisi di Goa Pindul adalah *negative peace*. Penyelidikan kedua, diperoleh bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan *positive peace* di Goa Pindul adalah dengan mendirikan badan usaha milik Desa Bejiharjo yaitu BUMDes Maju Mandiri, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kembali perebutan atas kepemilikan Goa Pindul. Pengelolaan Goa Pindul diserahkan kepada BUMDes dan dalam mengelola Goa Pindul, BUMDes bekerjasama dengan 11 operator dari Pokdarwis yang ada di Desa Bejiharjo dalam hal pelayanan wisatawan yang datang ke Goa Pindul. Pada penyelidikan ketiga diperoleh empat dimensi perubahan setelah terjadinya konflik yaitu dimensi pribadi, dimensi relasional, dimensi struktural, dan dimensi budaya.

Dalam transformasi konflik menurut Lederach terdapat 4 dimensi perubahan pasca terjadinya konflik, yaitu dimensi pribadi, dimensi relasional, dimensi struktural, dan dimensi budaya. Oleh karena itu empat dimensi itulah yang perlu di transformasi dalam upaya menciptakan *positive peace*. Dimensi pribadi ditunjukkan dengan kehadiran pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat berperan dalam meredam dan mengatasi konflik di Goa Pindul, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai kondisi damai yang positif pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melakukan pendekatan personal kepada operator-operator di Goa Pindul yang dilakukan secara langsung oleh Asti Wijayanti selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Gunadi, ia mengatakan:

...kiat-kiat Bu Asti memang bagus, beliau itu datang ke kelompok-kelompok secara rutin, mencari solusi, dan menggali apa yg ada. Bapak ini maunya apa, kelompok ini maunya apa, siapa yang

berkuasa untuk mengatur di Goa Pindul, siapa yang punya hak untuk menjual ke Goa pindul, haknya apa, kewajibannya apa. Nah solusinya itu Pokdarwis dapat menjual ke Goa Pindul di kerjasamakan dengan BUMDes karena BUMDes itu merupakan kepanjangan tangan dari dinas pariwisata yang diberikan sebuah ijin kecuali kepemanduan... (wawancara pada tanggal 11 Oktober 2018)

Hal yang sama disampaikan oleh Asti Wijayanti pada saat wawancara dengan peneliti pada tanggal 1 November 2018, ia mengatakan “Kalau saya yang saya lakukan, saya mencoba mendalami sebetulnya yang diinginkan oleh masing-masing orang (Pokdarwis) itu apa, yang diinginkan mereka itu apa...”. Melalui pendekatan personal, ia memberikan pemahaman bahwa Pokdarwis merupakan sekelompok masyarakat yang menjadi wadah dalam melaksanakan Sapta Pesona sehingga dapat merubah persepsi yang menganggap Pokdarwis sebagai pengelola pariwisata. Hal tersebut yang sering disalah artikan dalam ketentuan “1 (satu) destinasi wisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Pokdarwis”, mereka mengartikan bahwa Pokdarwis sebagai pengelola pariwisata. Jadi yang bekerjasama dengan BUMDes di Goa Pindul bukanlah Pokdarwis melainkan operator dari Pokdarwis tersebut, maka jika terdapat keluhan wisatawan terkait dengan pelayanan wisata yang kemudian di tegur bukanlah Pokdarwis tetapi operatornya.

Dimensi relasional Hubungan antar personal merupakan hal yang sangat penting setelah terjadinya konflik, dalam hal ini kualitas hubungan antar operator di Goa Pindul menjadi salah satu hal yang utama untuk tercapainya kondisi damai yang positif. Meskipun antar operator di Goa Pindul menunjukkan situasi damai yang negatif namun untuk kekurangan di antara operator mereka saling membantu melengkapi, mereka mau diajak bekerjasama dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Goa Pindul. Misalnya jalan yang rusak, saluran irigasi yang meluap, dan kerja bakti di area Goa Pindul untuk membersihkan sampah dan kotoran-kotoran lainnya. Ramiyanto mengatakan:

“...semua jadi teman karena (pengelolaan Goa Pindul) sudah diBUMDes, jadi kan sudah menyatu dan saling kerjasama dengan baik. Misalpun adanya selisih harga ya tidak masalah karena untuk tamu kita mencari sendiri-sendiri, jadi bukan satu marketing karena setiap Pokdarwis memiliki marketing sendiri-sendiri...” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2018)

Dimensi struktural dapat dilihat dari peran pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dibantu oleh Kapolres Gunungkidul untuk memediasi pihak-pihak yang bertikai dalam pengelolaan Goa Pindul pada tanggal 24 September 2016 di Polres Gunungkidul yang menghasilkan penandatanganan Nota Kesepakatan. Usaha dari pemerintah daerah maupun pemerintah setempat untuk menciptakan kondisi *positive peace* pasca penandatanganan Nota kesepakatan adalah dengan segera mendirikan BUMDes di Desa Bejiharjo. Salah satu tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk mengelola wisata di kawasan Bejiharjo khususnya yaitu Goa Pindul. Selain itu, pembentukan BUMDes merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”,⁸⁷ sehingga Pemda Kabupaten Gunungkidul sangat mendorong pemerintah desa Bejiharjo untuk segera merealisasikan terbentuknya BUMDes tersebut.

Pada tanggal 16 Desember 2016, BUMDes di Desa Bejiharjo resmi berdiri dengan nama BUMDes Maju Mandiri. Meski BUMDes sudah terbentuk bukan berarti dapat segera beroperasi, perlu beberapa waktu untuk menyiapkan program-program BUMDes terutama yang berkaitan dengan unit usaha pariwisata. Melalui beberapa ijin yang dimiliki oleh BUMDes maka pengelolaan Goa Pindul menjadi kewenangan BUMDes Maju Mandiri.

Beberapa upaya transformasi konflik pasca penyelesaian konflik yang telah dilakukan secara struktural diantaranya adalah pemerintah Desa Bejiharjo segera membentuk BUMDes untuk menjaga perjanjian

⁸⁷ Undang Undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

damai yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah membangun komunikasi yang selalu dilakukan melalui dialog, monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah kabupaten sehingga ikatan diantara Pokdarwis dapat semakin kuat. Selain itu, terdapat peran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam upaya transformasi konflik yaitu dengan melakukan koordinasi, pendekatan personal, dan membentuk grup *WhatsApp* untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di Goa Pindul dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan upaya dari BUMDes Maju Mandiri dalam menjaga perdamaian antara Pokdarwis adalah dengan selalu membangun komunikasi yang baik, melakukan pengecekan atau kunjungan ke sekretariat masing-masing Pokdarwis satu kali dalam seminggu.

Pada konflik yang terjadi di Goa Pindul peneliti tidak menemukan budaya setempat yang mempengaruhi proses perkembangan dalam menangani dan menanggapi konflik.

Pada saat penelitian ini dilakukan, pengelolaan Goa Pindul sudah diserahkan kepada BUMDes Maju Mandiri namun dalam pelayanan kepada wisatawan bekerjasama dengan 11 operator yang ada di Bejiharjo. Hal tersebut dijelaskan oleh Sariyanto selaku Direktur BUMDes Maju Mandiri pada saat wawancara dengan peneliti pada tanggal 19 November 2018 di Kantor BUMDes Maju Mandiri:

...pengelolaan secara umum itu oleh BUMDes tetapi untuk pelayanan kepada wisatawan ke Goa Pindul kita bekerjasama dengan 11 operator. Jadi kita kerjasamanya dengan operatornya bukan dengan Pokdarwisnya. Operator itu adalah unit pelayanan di Pokdarwis, jadi kalau semisal ada permasalahan yang kita putus kerjasamanya itu bukan dengan Pokdarwisnya tetapi dengan operatornya atau CV nya...

Upaya transformasi konflik di Goa Pindul tidak lepas terkait dengan manajemen pariwisata Goa Pindul karena peneliti melihat bahwa adanya konflik dan perselisihan antara operator disebabkan manajemen pariwisatanya belum baik. Manajemen bukan hanya sekedar untuk

mencapai tujuan organisasi tetapi bagaimana orang-orang atau kelompok yang menjalankan organisasi dapat bertanggungjawab terhadap pemanfaatan sumber daya maka perlu adanya 5 unsur dalam sebuah manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, *leading*, dan *controlling*. Dalam manajemen pariwisata di Goa Pindul seperti yang disampaikan oleh Asti Wijayanti pada saat wawancara dengan peneliti maka diperoleh sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan sejak tahun 2010 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Berawal dari kendala pemerintah daerah untuk mendatangkan wisatawan ke Gunungkidul karena hanya dikenal dengan wisata pantai. Oleh karena itu timbullah inisiatif untuk memunculkan ide-ide kreatif dengan mengembangkan destinasi wisata baru yang terlepas dari pantai tetapi berada pada rute menuju pantai sehingga muncullah Goa Pindul yang terletak di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo. Goa Pindul dianggap sebagai destinasi unik karena sebuah destinasi berupa gua yang di dalamnya terdapat aliran sungai bawah tanah, kemudian muncul gagasan untuk menyusurnya dengan menaiki ban pelampung bagi pengunjung yang datang. Hal tersebut menjadi *novelty* (keterbaruan) bagi kepariwisataan di Gunungkidul karena belum ada di tempat lain wisata susur sungai bawah tanah.

Goa Pindul juga menjadi alternatif wisata susur sungai Kali Suci karena *track* di Goa Pindul lebih mudah daripada *tracknya* Kali Suci. Untuk menyusuri Kali Suci dibutuhkan kondisi badan yang benar-benar fit karena *tracknya* agak berat dan panjang sedangkan di Goa Pindul tidak ada batasan usia untuk dapat menyusurnya dari mulai anak-anak hingga orang tua bisa melakukan perjalanan susur Goa Pindul karena jaraknya pun lebih pendek daripada Kali Suci.

2. Pengorganisasian

Setelah ditentukan destinasi wisata langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk organisasi untuk mengelola destinasi tersebut. Pada awalnya, pemerintah daerah menginisiasi organisasi kemasyarakatan melalui sebuah Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis maka kemudian terbentuklah Pokdarwis di Desa Bejiharjo dengan nama Dewa Bejo yang memiliki kepanjangan dari Desa Wisata Bejiharjo. Sebagai perintis, pada awalnya Pokdarwis Dewa Bejo hanya beranggotakan 4 orang yang secara aktif. Mereka membersihkan sungai dan di dalam gua dari sampah dan kotoran-kotoran kelelawar, menata lingkungan di sekitar gua sehingga layak untuk dikunjungi wisatawan. Untuk peralatannya pinjam dari wisata Kali Suci.

3. *Staffing*

Untuk stafnya diambil 4 orang yang secara aktif mulai merintis Goa Pindul yaitu Subagyo sebagai ketua kelompok, Tukijo sebagai wakil ketua, Pramuji sebagai sekretaris, dan Suratmin sebagai bendahara. Melalui media sosial Goa Pindul dapat semakin dikenal oleh masyarakat, mulai tahun 2011 semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Pemerintah daerah mengarahkan beberapa Pokdarwis untuk menjadi pelaku usaha. Pelaku-pelaku usaha yang kemudian memiliki jasa usaha untuk kepeemanduan, penyewaan ban, menyediakan fasilitas kamar mandi untuk ganti dan membersihkan diri, rumah makan, dan sebagainya.

4. *Leading*

Goa Pindul semakin berkembang dan mampu memberikan lapangan kerjabaru bagi penduduk Desa Bejiharjo, dengan berkembangnya Goa Pindul kemudian terbentuk Badan Usaha Milik Desa. BUMDes menjadi *leading* dalam pengelolaan Goa Pindul sehingga membawahi operator-operator dari Pokdarwis yang menyediakan jasa pramuwisata ke Goa Pindul.

5. *Controlling*

Dalam hal pengendalian atau *controlling* dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selalu memantau terhadap perkembangan masyarakat Bejiharjo yang pada awalnya bermata pencaharian sebagai petani kemudian beralih pada jasa pariwisata. Hal tersebut menjadi suatu hal yang mengejutkan karena adanya peningkatan penghasilan dalam waktu singkat.

Adapun manajemen kepariwisataan Goa Pindul Sariyanto menjelaskan bahwa terkait dengan pengelolaan Goa Pindul BUMDes berpedoman pada SOP pengelolaan Goa Pindul yang dibentuk oleh BUMDes, SOP tersebut mengatur mulai dari pengelolaan awal sampai pada pelayanan. Mengenai SOP tersebut peneliti tidak diijinkan untuk menggandakan karena menjadi peraturan tidak tertulis bahwa semua SOP yang ada di BUMDes Maju Mandiri tidak diperbolehkan untuk terekspos ke luar, hal tersebut untuk menjaga hak cipta penulisan SOP dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dari beberapa pembahasan menggunakan teori dan konsep transformasi konflik diperoleh bahwa di Konflik Goa Pindul terdapat perubahan atau transformasi yaitu transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi persoalan (masalah), dan transformasi kelompok dan personal. Beberapa upaya transformasi konflik yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan *positive peace* di Goa Pindul adalah melakukan pendekatan secara personal kepada operator-operator di Goa Pindul untuk memberikan pemahaman dan merubah persepsi mereka yang menganggap bahwa Pokdarwis sebagai pengelola pariwisata, membentuk BUMDes, melakukan koordinasi, dialog, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah.

Dengan adanya kondisi *positive peace* maka akan tercipta situasi tenang dan damai yang menjadi faktor berpengaruh dalam mewujudkan

tujuan nasional negara Republik Indonesia. Kedua hal tersebut menjadi salah satu unsur yang dapat menjaga stabilitas keamanan daerah.

Keamanan daerah merupakan keniscayaan yang harus di jaga sehingga roda pembangunan daerah tetap berjalan. Adapun keamanan daerah di Kabupaten Gunungkidul di koordinasikan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Beberapa pejabat daerah yang tergabung dalam Forkompinda adalah Bupati Gunungkidul, Wakil Bupati Gunungkidul, Kapolres Kabupaten Gunungkidul, Komandan Kodim (Komando Distrik Militer) 0730 Gunungkidul, Kepala Pengadilan Negeri Wonosari, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Kepala Pengadilan Agama Wonosari, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Forkompinda memiliki peran yang sangat strategis untuk dapat menyamakan visi dan dan persepsi dalam melihat sebuah kasus. Ketika terjadi permasalahan, mereka kemudian bermusyawarah, menyamakan persepsi dan visi agar dapat menentukan jalan keluar yang terbaik. Hal tersebut akan selalu diupayakan karena masalah keamanan menjadi tanggungjawab bersama, karena bupati tidak memiliki peralatan dan pasukan sehingga kerjasama dengan TNI dan Polri untuk membantu mengamankan wilayah Gunungkidul. Seperti dalam kasus konflik di Goa Pindul yang perlu penanganan dari beberapa sisi. Polri melalui Bhabinkamtibmas dan TNI melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa) berperan dalam upaya perdamaian di Goa Pindul, sedangkan pemerintah kabupaten di bantu oleh pemerintah desa berupaya dengan melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang berkonflik. Kekompakan di tingkat atas menyalur sampai di tingkat bawah.

Menurut Yuda Haryanto selaku sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gunungkidul bahwa secara keseluruhan konflik Goa Pindul secara keseluruhan tidak begitu berpengaruh terhadap keamanan daerah di Gunungkidul. Hal tesebut disampaikan ketika wawancara dengan peneliti pada tanggal 27

November 2018 di kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul. Ia mengatakan:

Secara keseluruhan wilayah di Gunungkidul itu tidak begitu berpengaruh terkait dengan konflik di Goa Pindul cuma intern antar pelaku di Goa Pindul saja. Untuk di kawasan Gunungkidul itu pengaruhnya kecil jadi hanya di sekitar Pindul saja. Bahkan ketika ada konflik pun pelayanan pindul tetep jalan karena konfliknya hanya di intern... (wawancara 27 November 2018)

Keamanan daerah terkait keamanan dalam negeri, dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri diselenggarakan melalui fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸⁸ Daerah kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan yang kemudian terbagi ke dalam beberapa desa. Oleh karena itu, keamanan daerah secara makro di tunjang oleh keamanan di tingkat mikro. Keamanan dalam lingkup wilayah kecamatan perlu melibatkan seluruh elemen yang ada seperti Camat, Kepala Desa, Polsek, dan masyarakat di wilayah itu sendiri.

Kepolisian Sektor (Polsek) Karangmojo memiliki komitmen dalam menjaga keamanan wilayah di Kecamatan Karangmojo. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polsek Karangmojo dengan sepenuh hati melalui kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja tuntas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan keselamatan termasuk pula keselamatan dalam berlalu lintas.

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk dapat menjaga stabilitas keamanan daerah perlu adanya dukungan dari keamanan wilayah di tingkat desa. Dalam konflik Goa Pindul, terciptanya kondisi damai yang positif di Goa Pindul dapat mendukung stabilitas keamanan di tingkat desa. Jika keamanan di tingkat desa kuat maka keamanan di tingkat daerah akan kuat, dan sebaliknya jika di tingkat makro tidak aman maka akan mengganggu stabilitas keamanan di tingkat makro.

Peran Polsek Karangmojo terkait dengan keamanan pariwisata di Goa Pindul yaitu dengan menugaskan Bhabinkamtibmas yang memang sudah melekat di masyarakat, namun hanya sebatas memberikan keamanan. Jika terjadi suatu permasalahan di intern pengelolaan Goa Pindul maka Bhabinkamtibmas tidak dapat turut mengatasi karena tidak memiliki wewenang untuk itu. Pada acara-acara tertentu melibatkan Sabhara (Samapta Bhayangkara) untuk bertanggungjawab dalam mengkondisikan lalu lintas.

Keamanan daerah di Kabupaten Gunungkidul terkoordinasi dalam Forkompinda, dimana di dalamnya terdapat beberapa pejabat daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut memiliki peran yang sangat strategis sehingga dapat dapat menentukan jalan keluar yang terbaik terhadap permasalahan yang ada.